

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL LUWU DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PALOPO

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.)



Oleh,

MUHADIR AZIS
NIM 17.19.2.01.0006

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL LUWU DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PALOPO

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.)



Oleh,

MUHADIR AZIS
NIM 17.19.2.01.0006

Pembimbing:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag
2. Dr. Muhaemin, M.A

Penguji:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag
2. Dr. Hasbi, M.Ag
3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I







PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo* yang ditulis oleh Muhadir Azis, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.01.0006, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1440 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

Palopo, 01 Maret 2019

Tim Penguji

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|---|
| 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. | Ketua Sidang/ Penguji (|  |) |
| 2. Dr. Hasbi, M.Ag. | Penguji (|  |) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Penguji (|  |) |
| 4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Pembimbing/Penguji (|  |) |
| 5. Dr. Muhaemin, M.A. | Pembimbing/Penguji (|  |) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang (|  |) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Rektor Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.
NIP. 19740502 2000031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadir Azis
NIM : 17.19.2.01.0006
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

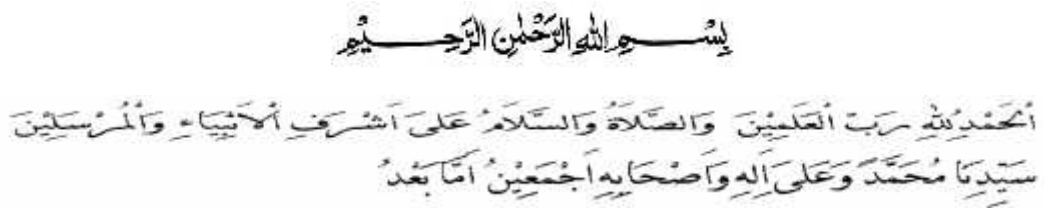
Palopo, 1 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muhadir Azis
NIM 17.19.2.01.0006

PRAKATA



Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul *Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*.

Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo sekaligus pembimbing I.
2. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo .
3. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A. dan Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I selaku Guru Besar IAIN Palopo.
4. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Matta (Bapak) Mau (Ibu) yang telah melahirkan dan membimbing serta memberikan motivasi, semangat, do'a, dan harapan selama dalam melanjutkan kuliah di Palopo.
5. Dr. Hasbi, M.Ag Penguji I dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I, selaku penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Muhaemin, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat, dalam melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN Palopo.
7. Para Dosen Pascasarjana IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
8. Madehang, S.Ag, M.Pd, selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo serta Rizal. S.Kom selaku staf perpustakaan Pascasarjana

IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan tesis.

9. Akmaluddin, MA.g (Allah Yarham) purna dosen sekaligus menjadi orang tua yang telah memberikan kesempatan ke Palopo, hingga melanjutkan pendidikan di MAN dan IAIN Palopo.

10. Drs. Andi Gunawan dan Bapak Al-Makhrus M. S.Pd beserta keluarga yang memberi semangat yang tidak pernah putus dan telah banyak memberikan motivasi, semangat, selama kuliah di IAIN Palopo.

11. Pengurus serta jamaah Mesjid al-Khaerat RSS Balandai yang telah memberikan kesempatan tinggal di mesjid.

12. Kepala sekolah dan guru serta staf SDIT Insan Madani Kota Palopo yang telah memberikan kesempatan menjadi guru dan belajar menjadi pendidik.

13. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana IAIN Palopo atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

14. Kepala sekolah, Guru, Staf serta Siswa MAN Palopo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti, untuk melakukan penelitian di madrasah ini, dalam rangka membantu meningkatkan proses pembelajaran di MAN Palopo.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *mīn y Rabbal ‘ lamīn.*

Palopo, 1 Maret 2019

P e n u l i s

Muhadir Azis

ABSTRAK

Nama : Muhadir Azis
NIM : 17.19.2.01.0006
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo

Tesis ini memfokuskan beberapa masalah, 1). Relevansi nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. 2). Upaya madrasah dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. 3). Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk relevansi nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Untuk menelaah upaya madrasah dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Untuk menelaah strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan Anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Sumber data yaitu data primer bersumber dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru mata pelajaran Akidah akhlak, al-Qur'an hadis, dan PKn serta siswa melalui wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data. Instrument dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Relevansi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi sejalan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dengan terciptanya suasana religius di lingkungan madrasah. 2) Upaya sekolah dan guru dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku positif dan penerapan sanksi tegas terhadap siswa yang melanggar. 3). Strategi guru melalui pengintegrasian mata pelajaran dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka wajib dan khusus, PMR, Paskibraka.

Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kesimpulan yang dikemukakan di atas tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Anti Korupsi, adalah sebagai berikut: a). Perlunya menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai penguatan pendidikan anti korupsi, b). Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan penguatan karakter bangsa.

ABSTRACT

Name : Muhadir Azis
NIM : 17.19.2.01.0006
Concentration : Islamic education
Title of Thesis : Local Wisdom Values of Luwu in Anti-Corruption Education at Madrasah Aliyah Negeri Palopo
Mentor : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag
2. Dr. Muhaemin, MA
Keyword : Local Wisdom Values of Luwu, Anti-Corruption Education MAN Palopo

This thesis focuses on several problems, 1). The relevance of local wisdom values of Luwu in anti-corruption education in Madrasah Aliyah Negeri Palopo. 2). The efforts of Madrasah in instilling local wisdom values of Luwu in the anti-corruption education in Madrasah Aliyah Negeri Palopo. 3). Strategy of the teacher in instilling local wisdom values of Luwu in the anti-corruption education in Madrasah Aliyah Negeri Palopo. This research aims to examine the teacher's strategy in instilling the local wisdom values of Luwu in the education of anti-corruption in the Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

This research is qualitative research that uses pedagogical, psychological, and sociological approaches. Sources of data are primary data sourced from head master, vice principals and teachers of the subjects like Moral Theology (Akidah Akhlak), hadith al-Qur'an, and PKn, as well as students through interviews, while secondary data taken from the documents that are related to the research. The instrument used in collecting data is the researchers themselves who function to determine and select informants as sources of data, analyze data, interpret data. The instruments in collecting data are observation, interviews, and documentation.

The results of the research concluded as follows: 1) The relevance of the value of local wisdom in anti-corruption education in line with the establishment of the values of the religious character education in the school. 2) The efforts of school and teacher in cultivating local wisdom values in anti-corruption education through habituation of positive behavior and the application of strict sanctions to violating students. 3). The teacher's strategy is through integrating the subjects and developing extracurricular activities such as compulsory and special scouts, PMR, Paskibraka.

The research implications based on the results of observations and interviews on the conclusions stated above about The values of Local Wisdom in Anti-Corruption Education are as follows: a). The need to re-explore the values of local wisdom as strengthening anti-corruption education, b). Making the local wisdom values as the basis for strengthening national character.

تجريد البحث

الاسم : محادر عزيز 17.19.2.01.0006
رقم القيد : التربية الإسلامية
التركيز : قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو
عنوان البحث :
المشرف : ١. الدكتور عبد الفيول، ماجستير
٢. الدكتور مهيم، ماجستير

كلمات البحث: حكمة لوو المحلية، تعليم مكافحة الفساد

يركز هذا البحث على العديد من المشاكل: (1). أهمية قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو. (2). جهود المدرسة في غرس قيم حكمة لوو المحلية في التعليم لمكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو. (3). إستراتيجية المعلم في غرس قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو. لهذا البحث إلى دراسة أشكال أهمية قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو. لدراسة جهود المدرسة في غرس قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو. لدراسة استراتيجية المعلم في غرس قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد في المدرسة العالية الحكومية فالوفو.

هذا البحث هو بحث نوعي الذي يستخدم المناهج التربوية والنفسية والاجتماعية. مصادر البيانات هي البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من رئيسة المدرسة ونوابها ومعلمي العقيدة والأخلاق، والقرآن الحديث، وتعليم المواطنة والطلاب من خلال المقابلات، في حين يتم أخذ البيانات الثانوية من الوثائق المتعلقة بالبحث. الأداة المستخدمة في جمع البيانات هي الباحث نفسه الذي يعمل لتحديد واختيار المخرين كمصادر للبيانات، وتحليل البيانات، وتفسير البيانات، والأدوات في جمع البيانات المراقبة، والمقابلات، والوثائق.

وخلصت نتائج البحث والتحليل إلى ما يلي: (1) أن أهمية قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد تتماشى مع غرس قيم تعليم الشخصية مع خلق جو ديني في بيئة المدرسة. (2) جهود المدرسة والمدرس في تنمية قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد من خلال استخدام السلوك الإيجابي وتطبيق عقوبات صارمة على انتهاك الطلاب. (3). استراتيجية المعلم هي من خلال دمج المواضيع وتطوير الأنشطة اللامنهجية مثل الكشفية الإلزامية والخاصة، الصليب الأحمر للشباب، وراعي العلم.

الآثار البحثية المستندة إلى نتائج الملاحظات والمقابلات على الاستنتاجات المذكورة أعلاه حول قيم حكمة لوو المحلية في تعليم مكافحة الفساد هي كما يلي: أ). الحاجة إلى إعادة استكشاف قيم الحكمة المحلية كتعزيز التوعية بمكافحة الفساد، ب). جعل قيم الحكمة أساسا لتعزيز الشخصية الوطنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya sehingga dikenal pemeluk suatu agama yang besar di muka bumi ini, yaitu agama Islam serta bangsa yang mempunyai etnis dan suku yang besar pula. Berangkat dari situ, melalui agama dan budaya masyarakat Indonesia memegang peranan penting dalam membangun bangsa ini, termasuk dalam pengembangan pendidikan yang bermuara pada penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan berkarakter.

Pendidikan merupakan proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses di mana bangsa menyiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹ Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan.² Maka diharapkan melalui nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pendidikan mampu melestarikan hal tersebut menjadi karakter yang tangguh dan dapat membentengi diri dari perbuatan korupsi.

¹ Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977), h. 14.

² Lukman Hakim, dalam *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jurnal Pendidikan Agama islam- Ta'lim, Vol.10. No. 2. 2012).

Proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi secara intensif. Pendidikan anti korupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan, sebagai upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.³

Degradasi moral yang terjadi pada bangsa Indonesia menyebabkan mulai mudarnya rasa kemanusiaan, rasa malu, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan amoral, antara lain korupsi. Dunia pendidikan berperan penting dalam memberikan andil untuk menepis terjadinya tindakan tersebut, maka perlu disikapi oleh semua pihak untuk membendung derasny arus korupsi di negeri ini. Nilai-nilai kearifan lokal bisa menjadi alternatif dalam pendidikan anti korupsi di sekolah.

³ Sumiarti, *Pendidikan Antikorupsi* (Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan P3M STAIN Purwokerto INSANIA Vol.12. No.2, 2007).

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa.⁴

Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan anti korupsi, dibutuhkan pencarian dan pengembangan kearifan-kearifan lokal (*local wisdoms*). Untuk menggali kembali ajaran-ajaran luhur setempat guna diterapkan dalam pendidikan anti korupsi.⁵ *Pappasang* atau pesan leluhur yang tertulis dalam aksara *Lontara* bugis ditemukan banyak nilai kearifan lokal yang dapat menjadi nilai dasar. Seperti berpegang teguh pada: *Dua kuala sappo* (dua yang saya ambil sebagai pagar): *Unganna panasae-lempu* (tunas nangka yang disebut jujur), *belona kanukue-pacci* (hiasan pewarna kuku yang disebut *pacci*). Kata *lempu* metafor untuk hidup lurus dan jujur; *pacci* metafor hidup bersih. Kejujuran dan kebersihan adalah pagar yang selalu dibangun masyarakat Bugis, untuk mengelilingi dirinya

⁴ Oktavia Adhi Suciptionsih, *Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Pati* (Jurnal Universitas PGRI Semarang, Vol.4. No.2. 2014).

⁵ Nugroho, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah" Blog Nugroho-kriminolog. <http://nugrohokriminolog.blogspot.co.id/2017/01/urgensi-pendidikan-antikorupsi-di.html>. (Diakses 24 April 2018).

di mana pun ia bekerja.⁶ Suatu budaya hidup, apabila selalu dipertahankan dan dilestarikan menjadi suatu tindakan yang berdampak baik pada proses kehidupan.

Pendidikan anti korupsi perlu menggali dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal. Penerapan kearifan-kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi diharapkan agar penduduk setempat mudah memahami pengertian, bahaya, dan perilaku korupsi. Selain itu, mereka sadar bahwa leluhur mereka memiliki ajaran-ajaran luhur yang amat menghargai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan mereka.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit didefinisikan secara tepat ruang lingkungannya.⁷ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan busuk, palsu, dan suap.⁸ Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan buruk yang merusak moral pribadi maupun bangsa, sehingga menyebabkan kerugian dan menghambat kemajuan bangsa Indonesia.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam pendidikan tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan

⁶Stanislaus Sandarupa” *Kearifan Lokal Anti Korupsi*” Kompas 14 Mei 2011. <https://nasional.kompas.com/read/2011/05/14/03510628/Kearifan.Lokal.Antikorupsi.> (28 Juli 2018).

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2011), h. 1.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 28.

perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Agar pendidikan anti korupsi ini berhasil, maka perlu adanya dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama dari sekolah atau madrasah.

Maka dari itu, pendidikan yang merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, maka pendidikan tersebut dilakukan melalui peran transfer pendidikan baik secara aspek kognitif, sikap (afektif), maupun keterampilan (psikomotorik).⁹ Sekolah menempati posisi strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudidayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa.¹⁰ Karena sekolah merupakan aspek penting, maka perlu mengembangkan materi kurikulum berbasis pada internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat membentuk kesadaran siswa sejak dini tentang pentingnya pendidikan anti korupsi.

Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan bersusila (akhlakul karimah). Internalisasi nilai-nilai islami berarti pula membentuk mental dan kepribadian siswa. Diharapkan dari titik awal ini, siswa ketika tumbuh menjadi

⁹ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 35.

¹⁰ Nadri Taja dan Helmi Aziz, “*Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas*” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, nomor. 1, Juni 2016, h. 40.

remaja akan terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat mentalnya hingga melakukan tindakan negatif, seperti tindakan korupsi.

Ada tiga sikap moral fundamental yang utama yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yakni kejujuran, rasa tanggung jawab dan rasa keadilan yang kesemuanya merupakan nilai-nilai ajaran Islam.¹¹ Islam secara tegas mencanangkan konsep, kejujuran, tanggung jawab dan keadilan, serta konsisten mengutuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana, firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah (2): 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹²

Nilai kearifan dan budaya lokal sesungguhnya merupakan solusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara khazanah kearifan lokal yang relevan dengan ajaran Islam yaitu terdapat dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw yang dikemas oleh ulama untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan.

¹¹ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), h. 29.

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: al-Hikmah 2013), h. 27.

Untuk membendung korupsi di negara ini, maka salah satu alternatif adalah mengembangkan kesadaran anti korupsi dengan mengembangkan materi berbasis nilai-nilai kearifan lokal Luwu dengan terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan penguatan nilai-nilai ajaran Islam dan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat mengurangi dampak tindakan korupsi di masa yang akan datang.

Melalui nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat setempat, bahkan banyak diakui negara lain karena nilai-nilai tersebut yang dimiliki, dibandingkan dengan negara lain. Baik itu tutur katanya, tingkah lakunya, keanekaragaman nilai kearifan dapat mencerminkan perilaku dari masyarakat tersebut. Namun, kini banyak kearifan lokal yang mulai hilang seiring berkembangnya jaman. Di mana banyaknya pengaruh budaya asing dapat mengakibatkan pembentukan kepribadian seseorang menjadi tidak santun, dan juga dapat mengakibatkan perubahan kearifan dan budaya dari setiap daerah tentunya. Dengan keadaan seperti ini, kita harus lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap di jaga dan dikembangkan melalui lembaga pendidikan serta menjadi penguatan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

Pelaksanaan pendidikan di MAN Palopo ini telah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun pelajaran 2015/2016. Di mana kurikulum 13 menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter yang baik, MAN Palopo merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara kontinyu menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam proses pendidikan. Hal ini didukung dengan adanya peraturan Ditjen

Pendis tentang “ Panduan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah” Wacana inilah pendidikan anti korupsi yang mengandung nilai-nilai karakter yang perlu di galakkan dengan cara mengintegrasikan melalui berbagai kegiatan madrasah. Pendidik dan siswa Madrasah Aliyah Negeri Palopo merupakan bagian dari komunitas masyarakat Bugis Luwu yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, dalam lembaga pendidikan nilai-nilai tersebut, diaplikasikan melalui strategi yang dilakukan oleh guru diantaranya dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam beberapa mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan keteladanan, mengajak peserta didik untuk aktif dalam kegiatan bersama, serta pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah upaya dan strategi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi pada beberapa mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

a. Relevansi nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

b. Upaya Madrasah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

c. Strategi guru mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

2. Deskripsi fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam lingkungan madrasah dan proses pembelajaran untuk mendukung pencegah tindakan korupsi sejak dini, melalui pendidikan anti korupsi.

a) Mengidentifikasi nilai-nilai keartifan lokal Luwu yang masih dilestarikan pada Madrasah Aliyah Negeri Palopo sebagai landasan interaksi yang dilakukan sekolah baik, dalam proses pembelajaran maupun interaksi sehari-hari sebagai upaya pencegah tindakan korupsi sejak dini.

b) Upaya sekolah melalui kebijakan kepala sekolah dan program-program sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

c) Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

C. Definisi Operasional

Penulis mengemukakan beberapa kata yang dipandang memerlukan penjelasan yaitu :

1. Nilai-nilai kearifan lokal Luwu

Nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang dimaksud peneliti adalah nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat universal namun dimaknai secara lokal oleh

masyarakat Bugis Luwu. Nilai-nilai tersebut seperti; kejujuran (*lempu*), tanggung jawab (*getteng*), kerja keras (*reso*), malu/harga diri (*siri*).

2. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga negara maupun di sekolah dalam rangka memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi di masa kini dan masa yang akan datang.

3. Madrasah Aliyah Negeri Palopo

Madrasah Negeri Aliyah Palopo merupakan lembaga pendidikan negeri yang berada di Kota Palopo, dimana peserta didiknya merupakan komunitas masyarakat Luwu. Pada madrasah ini menerapkan nilai-nilai Islam baik dalam kurikulum pembelajarannya maupun dalam etika sehari-hari.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) Mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.
- b) Mengetahui upaya sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang dilaksanakan Madrasah Aliyah Negeri Palopo.
- c) Menganalisis strategi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

2. Manfaat penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Teoretis

- 1) Menambah wawasan tentang nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.
- 2) Diharapkan dapat menjadi pegangan atau rujukan sebagai bentuk pengambilan kebijakan para kepala sekolah, pendidik, serta praktisi pendidikan, untuk selalu membuat kebijakan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan Pendidikan Agama Islam dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

b. Praktis

- 1) Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam rangka pembelajaran pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.
- 2) Bagi lembaga pendidikan Islam sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, dalam bentuk iklim sekolah, proses pembelajaran dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dijadikan sebagai masukan bagi para pendidik yang ada di dalamnya dan pemerintah secara umum, serta menjadi pertimbangan untuk

dapat diterapkan sebagai solusi alternatif pencegahan tindakan korupsi yang akan terjadi di masa akan yang datang.

- 3) Bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan agama Islam sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan melalui pelestarian kearifan lokal.
- 4) Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelusuran bahan pustaka yang dilakukan peneliti yang terkait dengan masalah yang akan diteliti merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi serta keterangan yang relevan dengan judul yang telah diteliti, ditemukakan beberapa karya ilmiah berupa tesis dan jurnal yang semakna dengan penelitian ini di antaranya:

Ahmad, *Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*, Tulisan ini memfokuskan pada penerapan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 1 Bajo dengan bentuk pelaksanaan yaitu: tahapan implementasi dan tahap evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan melalui kegiatan kulikuler dan ekstrakulikuler, Kegiatan kulikuler dilaksanakan dalam mata pelajaran PAI. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Bajo. Melalui pengintegrasian mata pelajaran sehingga peserta didik mampu memahami arti anti korupsi, peserta didik mampu membiasakan perilaku anti korupsi, bersikap adil, jujur, dan tanggung jawab.¹

¹ Ahmad, *Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu*, (Tesis Magister, Palopo: IAIN Palopo, 2017).

Muhammad Yusuf, *Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis*, mengemukakan bahwa nilai-nilai luhur dan ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai kebenaran universal yang bersumber dari Tuhan, di mana nilai kejujuran yang terdapat dalam al-Qura'an merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) manusia secara keseluruhan dalam bertindak dan berperilaku. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa penanaman nilai-nilai *siri na pesse* sebagai nilai kejujuran yang merupakan ranah afektif sebagai bagian integral dalam pendidikan yang menjadi kunci membangun karakter dan integritas peserta didik yang kelak memegang amanah publik. Oleh karena itu, pemberian porsi terhadap aspek kognitif, intelektual secara tidak seimbang dengan aspek emosional dan spiritual telah dan akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dengan nilai-nilai al-Quran dan kearifan lokal dapat membentengi diri dari perbuatan tercelah tersebut.²

Nadri Taja dan Helmi Aziz, *Mengintegritasi Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas*, membahas tentang nilai-nilai anti korupsi yang dianggap dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tindak kriminal korupsi yang sedang menimpa bangsa ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah atas. Hal ini dilakukan karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

² Muhammad Yusuf, *Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis*, e-jurnal Volume 11, Nomor 2, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2015. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/452>

di sekolah menengah atas memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang kemudian diinternalisasikan ke dalam jiwa peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan suatu rancangan perencanaan pembelajaran, yang termuat di dalamnya nilai-nilai berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.³

Nurul Yaqin dalam tulisannya yang berjudul, "*Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah.*" Membahas tentang program pelaksanaan pendidikan anti korupsi di madrasah. Korupsi saat ini keberadaannya sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Korupsi sudah tidak mengenal tempat dan geografis, waktu, profesi, dan atribut. Korupsi sudah menghantui dan melumuri berbagai aspek kehidupan, mulai dari instansi pemerintah hingga swasta, dari perkotaan hingga perkampungan, dari para pejabat pemerintah hingga kaum terdidik dan tokoh agama sekalipun.

Salah satu langkah praktis tersebut adalah edukasi masyarakat melalui pendidikan anti korupsi di madrasah yang diharapkan dapat mencegah secara dini perbuatan atau tindak korupsi dari lapisan bawah. Dari pendidikan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hal-hal yang dapat berkenaan dengan korupsi yang pada akhirnya mampu untuk menghindari perilaku tercela tersebut. Sehingga

³ Nadri Taja dan Helmi Aziz, *Mengintegritasi Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal, Yogyakarta: vol. XIII, no..1, UIN Sunan Kali Jaga, 2016). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/jpai/article/view/1407>

harus mempunyai pelaksanaan strategi pendidikan anti korupsi di madrasah yang dapat dijalankan melalui 1) pengintegrasian materi anti korupsi dalam mata pelajaran, 2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.⁴

Beberapa literatur yang telah dilakukan peneliti sebelumnya semakna dengan penelitian yang akan dilakukan dan relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan, namun belum ada penelitian sebelumnya membahas tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Secara substansi penelitian ini dapat secara mendalam menggali tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi, inilah yang membedakan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad	Pendidikan Anti Korupsi	Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI
2.	Muhammad Yusuf	Pendidikan Anti Korupsi	Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis al-Quran dan Kearifan lokal Bugis
3.	Nadri Taja dan Helmi Aziz	Pendidikan Anti Korupsi	Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI
4.	Nurul Yaqin	Pendidikan Anti Korupsi	Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah
5.	Peneliti	Pendidikan Anti Korupsi	Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo

⁴ Nurul Yaqin, *Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Islamuna volume 2 nomor 2, STAIN Pemekasan, 2015.
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/666>

Penelusuran literatur di atas terdapat persamaan dan perbedaan dan namun tampak perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menjadi fokus peneliti mengenai nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo.

B. Landasan Teoretis

1. Nilai-nilai kearifan lokal Luwu

a. Pengertian kearifan lokal

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari (*local genius*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.⁵ Dalam membangun peradaban yang berbudaya, tentu tidak melupakan kebudayaan awal yang menjadi pondasi awal dari kebudayaan tersebut, sehingga menjadi nilai kearifan lokal yang berbeda dari kebudayaan yang lain.

⁵ Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011), h. 29.

Selanjutnya Istiawati berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁶

Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Bagi kita, upaya menemukan identitas (*reinventing*) bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah Nusantara. Dalam kaitan ini, kearifan lokal yang terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup dan berkembang adalah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara keseluruhan. Pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah itu sendiri. Kearifan lokal yang juga meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu, dengan demikian, juga berfungsi

⁶ Istiawati, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*, Jurnal CENDIKIA, Vol. 10. 1 <https://www.google.com/search?q=istiawati+2016&ie=utf-8&oe=utf-8#> diakses tanggal 20 September 2018.

untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang.⁷

Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.⁸ Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dipandang nilai yang mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: *pertama*, mampu bertahan terhadap budaya luar; *kedua*, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; *ketiga*, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya

⁷ Mardia, *Kontekstualisasi Nilai-nilai Pendidikan Spiritual terhadap Penguatan Budaya AssiddiAng Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang*, Jurnal vol. 11, no. 2, Agustus 2016. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/1725>

⁸ Sedyawati Edy, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 382.

asli; *keempat*, mempunyai kemampuan mengendalikan; *kelima*, mampu memberi arah pada perkembangan budaya.⁹

b. Nilai-nilai kearifan lokal Bugis Luwu

Luwu merupakan kerajaan tertua, khususnya di Sulawesi Selatan, kerajaan Luwu, Gowa dan Bone tiga kerajaan dalam bahasa Bugis dikenal dengan *Tellu Bocco'e* (yang artinya tiga yang utama) bahkan ada kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil, tetapi semuanya kerajaan Luwu yang utama dan tertua. Meski demikian kenyataannya masih sangat sedikit disadari oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Luwu sendiri, terlebih generasi muda.

Kerajaan Luwu sudah di kenal sejak abad ke-XIII setidaknya ada dua pakar lokal berkompeten mengutarakan pendapatnya, yakni Sanusi Daeng Mattana, dan C. Salombe. Keduanya merupakan putra daerah-yang murni berdarah Bugis, sehingga mereka memahami unsur-unsur kebudayaannya secara jelas dan paling mendekati kenyataan.

Sanusi Daeng Mattana, menganalisis penamaan Luwu dari segi leksikalnya yang mengacu pada nilai religius. Menurutnya, “luwu” berasal dari kata ‘riulo’ yang berarti, “diulurkan dari atas “. Ini tentu saja berhubungan dengan erat dengan folkbelief di Tanah Luwu yang berbunyi, “langit mengulurkan bumi, menghamparkan, lalu menaburinya dengan kekayaan yang melimpah.”

Sementara C. Salombe mengacu pada makna referensinya-kata ‘luwu’ atau ‘lu’ dihubungkan dengan laut. Menurutnya, ‘lu’ berasal dari kata ‘lau’ yang artinya ‘laut’ dan dapat disamakan dengan timur. Sedangkan kata ‘*to raja*’ atau ‘*to*

⁹ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat 2004. 37 (2): 111-120. <http://de.sain.gr.a.fi.sindonesiawordpress.com/2009/02/menggali-kearifan-lokal-nusantara1.pdf> (Diakses 31 Agustus 2018).

riaja' sebagai nama Suku Toraja merupakan penyebutan Orang Luwu kepada orang yang mendiami daerah pegunungan atau wilayah barat. Sebaliknya, Luwu adalah penyebutan Orang Toraja kepada orang yang mendiami pesisir pantai bagian timur atau dataran rendah.

Pendapat C. Salomboe itupun didukung oleh Andi Zainal Abidin, salah Seorang sejarawan dan budayawan Bugis. Menurutnya, Luwu bermakna wilayah pesisir. Dengan demikian, Luwu pun dijuluki sebagai Kerajaan Pantai Luwu. Yang menjadi penganutnya adalah Luwu merupakan kerajaan pertama yang mencangkup sepanjang pantai selawesi dan mempersatukan wilayah Gorontalo di utara hingga Selayar di selatan.

Lalu, apakah pendapat Sanusi Daeng Mattana terlalu berlebihan? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena pada dasarnya beliau memaknai 'luwu' berdasarkan nilai religius Kerajaan Luwu. Hanya saja, pendapat C. Salomboe lebih mudah di jelaskan secara historis. Dan, kedua pendapat itu sama-sama menunjukkan kebesaran Kerajaan Luwu.¹⁰

Mahakarya tanah Luwu ini ditulis dalam huruf lontara dengan bahasa Bugis kuno sekitar abad XIV lalu disalin ulang oleh *Colli' Puji'e Arung Pancana Toa* sebanyak 12 jilid yang kini tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Bagian yang berhasil disalin berjumlah 6.000 halaman dan terdiri dari 300.000 baris teks. Meskipun hanya sebagian, *I La Galigo* merupakan karya sastra terbesar dan terpanjang di dunia, mengalahkan epos Ramayana.¹¹

¹⁰ H.L. Purnama, *Kerajaan Luwu menyimpan banyak Misteri*, (Makassar Arus Timur : 2014), h. 3-4.

¹¹ H.L. Purnama, *Kerajaan Luwu menyimpan banyak Misteri*, h. 14.

Berdasarkan catatan sejarah, awal mula suku bangsa yang mendiami pulau ini berasal dari Hindia Belakang. Mereka pertama kali datang sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Inilah yang kemudian disebut Protomelayu (Melayu pertama) yaitu suku bangsa Toraja, yang selanjutnya disusul migrasi kedua, diperkirakan datang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, biasa disebut Deutro Melayu (Melayu Kedua). Mereka yang dimaksud dalam hal ini adalah suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Dengan kehadiran pendatang yang kedua tersebut, yang jumlahnya lebih banyak daripada pendatang yang pertama maka pendatang pertama “Protomelayu” tergeser ke daerah pedalaman dan memasuki daerah Tana Toraja, sedangkan Deutro Melayu terpencar atau menyebar dan mendiami daerah pantai.¹² Sebelum datangnya Islam, masyarakat Bugis memiliki sistem dan tata nilai yang sangat kental. Tata aturan hidup masyarakat Bugis pra Islam, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun pemerintahan dan kemasyarakatan yang disebut *Pangngaderreng* (Bugis), *Pangngadakkang* (Makassar), *Pangngadarang* (Luwu), *Aluk To Dolo* (Toraja), dan *Ada'* (Mandar).¹³

Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis Luwu itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis Luwu dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Menurut Abdul Pirol “mengaku sebagai orang Luwu bukanlah suatu perkara mudah. Karena pengakuan itu harus dibarengi dengan pemaknaan akan jati diri dan nilai-nilai

¹² Abu Hamid, . *Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan dalam Buku Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, (Ujungpandang: IAIN Alauddin. 1980), h. 65.

¹³ Tim Penulis Depdikbud., *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*, (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2004), h. 20.

luhur”¹⁴ Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai peletak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis pada umumnya. Selanjutnya, dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya mewariskannya, mereka menyampaikan dalam bentuk nasihat atau pesan. Nasihat dan petuah itu terdapat dalam *lontara’-lontara’* yang disebut *pappangaja* dan *paseng*.¹⁵

Dari budaya *Pangadereng* yang bersumber dari *lontara dan paopao rikadong*, lahir sejumlah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bugis, dan yang populer disebut dan sering dijadikan materi nasehat hingga sekarang adalah nilai-nilai *sipakatau* (saling memanusiaikan) *sipakalebbi* (saling menghargai), *sipakaenge*, dan lain-lain. Rahman Rahim menelusuri nilai-nilai budaya dan kearifan Bugis melalui “*Paopao Rikadong*” hasil kumpulan Mattes. Ia mengangkat dari *Paopao Rikadong*, sejumlah nilai-nilai Budaya Bugis seperti nilai, *alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecerdasan), *asitinajang* (kepatutan), *agettengeng* (keteguhan), *reso* (usaha), dan *siri* (malu atau harga diri).¹⁶

Masyarakat Bugis, sejak dahulu dikenal memiliki sistem kehidupan dan tata nilai yang mereka pedomani dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis itu meliputi kejujuran (*lempu’*), kecendekiaan (*amaccang*), kepatutan (*assitinajang*), keteguhan

¹⁴ Abdul Pirol, “Mengakulah Sebagai Orang Luwu” Palopo Pos, 23 Januari 2019.

¹⁵ A. Rahman Rahim. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: (Penerbit Ombak. 2011) h. 66.

¹⁶ A. Rahman Rahim. *Nilai-Nilai Kebudayaan Bugis*, h. 81.

(*aggettengeng*), usaha (*reso*), prinsip malu (*siri'*).¹⁷ Nilai-nilai tersebut diwariskan oleh leluhur Bugis melalui *Papangngaja* (nasihat) dan *Paseng* (amanat). Nilai-nilai sosio-kultural seperti: *alempureng* (Kejujuran), *amaccang* (kearifan), *asitinajang* (Kepatuhan), *aggettengeng* (keteguhan), *reso* (Usaha) dan *siri'* harga diri sudah menjadi nilai normatif yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat Luwu.¹⁸ Jika ditelusuri lebih dalam, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sejak dulu kaya akan kearifan lokal yang relevan dengan sikap integritas dengan pendidikan anti korupsi sebagai nilai utamanya.

Oleh sebab itu, dalam konteks penanaman nilai-nilai anti korupsi untuk membangun integritas peserta didik, dibutuhkan pengenalan, pemahaman dan pengembangan kearifan-kearifan lokal. Guru sebagai garda terdepan pembangun karakter bangsa perlu menggali kembali kearifan-kearifan lokal Indonesia khususnya Bugis-Luwu yang sarat akan nilai-nilai kearifan.

Nilai anti korupsi juga nilai integritas dalam nilai kearifan lokal nilai-nilai dan pendidikan karakter yang disusun oleh KPK untuk menumbuhkan budaya integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program pendidikan anti korupsi tersebut merupakan amanat UU nomor 30 pasal 13(c) Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menjelaskan bahwa KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Kesembilan nilai integritas tersebut

¹⁷ A. Rahman Rahim. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. h. 120.

¹⁸ Sattu Alang, *ANAK SHALEH (Telaah Pergumulan Nilai-nilai Sosio Kultural dan Keyakinan Islam pada Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo Sulawesi Selatan)*, (Yogyakarta: (Desertasi UIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 21.

adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja-keras, sederhana, berani dan adil.¹⁹ Lembaga sekolah berperan penting dalam memberikan pemahaman dan pengertian dari sembilan nilai-nilai tersebut, baik melalui pengintegrasian mata pelajaran maupun melalui pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal, sebagai upaya bentuk pemberian pemahaman kepada peserta didik tentang pencegahan perilaku korupsi sejak dini.

2. Pendidikan anti korupsi

a. Pengertian korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁰ Menurut KBBI korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perbuatan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹ Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat

¹⁹ UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, <https://www.kpk.go.id> (Diakses 5 Mei 2018).

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), h. 4.

²¹ Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 4.

di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bidikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata, dan penghasilan yang kurang memadai.²³ Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung.

Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Di samping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan

²² Klitgaard, R. *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001), h. 31.

²³ Suyitno, ed. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), h. 23.

korupsi sepertihalnya ingin cepat kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial.

Di dalam bahasa arab korupsi bisa juga disebut dengan istilah Risywah yang berarti penyuapan. Kata Risywah terbentuk dari kalimat ²⁴.

Adapun secara terminologis Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Dalam bahasa sehari-hari risywah dapat diartikan sebagai sogok atau suap.²⁵ Islam mengharamkan suap dalam segala bentuk, para ulama fiqh telah menentukan definisinya yaitu: semua harta yang diberikan kepada seseorang penguasa, hakim(qodhi) atau pejabat yang dimaksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang mestinya wajib diputuskan olehnya dalam pembayaran dalam bentuk apapun juga. Harta atau uang yang diberikan dengan kaitannya dengan soal itu adalah suap. Semua suap adalah haram apapun bentuk dan jenisnya, banyak ataupun sedikit, dengan cara apapun dibayarkan atau diberikan, dan dengan jalan apapun juga harta atau uang itu diterima.

Ghulul berasal dari kata **يَغْلِبُ** - yang berarti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang dan harta-harta lain, sedangkan menurut Ibn al-Atsir, Ghulul adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut dan setiap orang yang berkhianat secara

²⁴ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Daru Sadir, tth, jilid 14), h. 322

²⁵ Abdul Ghani, *Hukum Suap Dan Hadiah*, (Jakarta: Cendikia, 2003), h.122.

sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat *Ghulul*.²⁶ Maksud dari Ghulul menurut A'la Rofiqul adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta ghulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar', baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.²⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ghulul* adalah penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Di dalam hadits terdapat ancaman terhadap pelaku korupsi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِطِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair yakni Ibnu Muhammad dari Abdullah yakni Ibnu Muhammad bin Aqil dari Atha bin Yasar dari Abu Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi

¹⁰ Irdamisraini, "Korupsi Perspektif Pidana Islam" *Jurnal Hukum Islam*, (Riau: 2008), h. 123.

²⁷ A'la Rofiqul, "Membongkar Suap", *Jurnal Teras Pesantren*, (Sarang Rembang: M3S PP, 1424), h. 99.

Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad)²⁸

Arya Maheka memberikan alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain:

- a. Penegakan hukum tidak konsisten; penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang,
- c. Lingkungan yang anti korupsi sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas,
- d. Rendahnya pendapat penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara sehingga mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan; Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi; saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

²⁸ Imam Ahmad Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1993, Jilid 3, h. 126.

- h. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magniz Suseno bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.²⁹

Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting karena hal ini akan menunjukkan seberapa penting pendidikan anti korupsi bagi masyarakat demi terwujudnya negara yang bersih dari budaya korupsi.

b. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai

²⁹ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK Qodir dkk, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Media Wacana Press, 2006.), h. 23-24.

dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 Bab I, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi pendidikan nasional diatur dalam undang-undang, yang berbunyi:

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”³¹

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang anti korupsi.

Pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi.³² Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap secara tegas menolak segala bentuk korupsi. *Corruption is the offering and accepting of bribes*)

³⁰ Depdiknas, *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Depdiknas, 2009), h. 3.

³¹ *Undang-undang RI No.20 tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003.

³² Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 144.

(penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu juga diartikan “*decay*” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang busuk atau rusak itu ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sesuai dengan arti *corruptus* atau *corruptio* (kerusakan moral).³³

Pendidikan anti korupsi berhubungan dengan pendidikan moral. Pendidikan moral harus memberikan perhatian pada ketiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*) yaitu, pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral action*).³⁴ Sedangkan *moral action* merupakan perpaduan antara *moral knowing* dan *moral feeling* yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*). Ketiga komponen tersebut perlu diperhatikan dalam kaitanya dengan pendidikan anti korupsi yang di dalamnya mencakup perilaku anti korupsi agar siswa memahami, merasakan, dan mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi berhubungan dengan pendidikan moral karena memiliki esensi dan makna yang sama mengenai pendidikan akhlak. Tujuannya membentuk pribadi anak agar menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Kriteria baik yang dimaksud ialah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi budaya masyarakat dan bangsanya, yakni yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

³³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 34.

³⁴ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. h. 114.

Menurut UU nomor .31 Tahun 1999 yang diperbaharui dalam UU nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

a). Tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara.

b). Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung tindak pidana korupsi.

c). Perbuatan yang buruk seperti menggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

d). Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya), Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya), Korumptor (orang yang korupsi).³⁵

Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan kepada generasi muda. Dalam konteks ini pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia untuk menuju kepada pendewasaan diri. Dalam demokrasi, publik sangat tertarik pada keadilan sistem pendidikannya. Jika publik tidak mempercayai sistem pendidikan untuk menjadi adil atau efektif, lebih banyak dapat dikorbankan daripada pertumbuhan ekonomi.³⁶ Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

³⁶ Heyneman, S. P. 'Education and corruption', *International Journal of Educational Development*, 24(6), pp. 637–648. doi: 10.1016/j.ijedudev.2004.02.005. (2004).

dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui system nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.³⁷

Dengan demikian pendidikan proses pembudayaan melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup sebuah masyarakat.

Dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai, bukan kemahiran menjelaskan tentang nilai-nilai, tetapi juga menggunakan pengetahuan tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaksanaan konsep pendidikan anti korupsi dapat mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbarui sistem nilai akan tercapai dengan baik.

c. Nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan,

³⁷ Sumiarti. *Pendidikan Anti Korupsi. Jurnaln INSANIA*. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Ags 2007.) diakses pada tanggal 27 Oktober 2018).

keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.³⁸

1) Kejujuran

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Menurut Sugono dalam *kamus Bahasa Indonesia untuk pelajaran* kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan, tanpa sifat jujur kita tidak akan dipercaya dalam kehidupan social.³⁹ Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika merujuk pada pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kejujuran yang diajarkan sebagai sebuah materi belajar memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan manfaat karakter jujur bagi orang lain dan diri sendiri. Selain itu peserta didik diajarkan tentang pentingnya memupuk karakter kejujuran dalam hidup. Selanjutnya, dalam aktivitas belajar mengajar, guru dan peserta didik bersama-sama mengidentifikasi karakter jujur sebagai karakter utama yang perlu dimiliki dan menjelaskan dampak perilaku tidak jujur bagi kehidupan. Sikap yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran di antaranya

³⁸ Kemendikbud. *Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/faq> pada tanggal 26 November 2018 Pukul 13:22 WITA.

³⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: 2011) h. 75.

adalah berkata benar, bertindak benar, terbuka dan mampu menghargai diri sendiri.⁴⁰

2) Kepedulian

Peduli ialah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Sugono dalam definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan Kepedulian sangat penting bagi seorang dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di sekolah ataupun di masyarakat. Dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kepedulian yang menjadi materi tersendiri mengarah pada beberapa tujuan pokok. Diantaranya, guru dan peserta didik bersama-sama mampu menjelaskan pentingnya memiliki sikap peduli. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli yang merupakan kunci utama persatuan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengetahui batasan-batasan peduli dalam aktivitas sehari-hari. Sikap-sikap yang ingin diajarkan dalam proses pembelajaran, kaitanya dengan nilai kepedulian seperti misalnya rasa persaudaraan, empati, toleransi, kesetia kawan, membela yang benar, satu rasa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan terhadap penderitaan yang dialami orang lain.⁴¹

⁴⁰ Rustika Thamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), 39-40.

⁴¹ Rustika Thamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 3*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), h. 42-47.

3) Kemandirian

Kemandirian ialah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri sebagaimana pengertian di atas yang berarti keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain akan membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang sanggup mengatasi segala persoalan sendiri. Nilai kemandirian sebagai salah satu materi yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi karakter mandiri. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat kemandirian dalam membentuk sikap tangguh. Selanjutnya, guru dan peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dalam membuat keputusan. Sikap yang hendak ditanamkan dalam pembelajaran nilai kemandirian adalah peserta didik mampu melakukan segala hal sendiri, berdikari, percaya diri, tidak bergantung kepada orang lain, tegar dan juga berani.⁴²

4) Kedisiplinan

Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan di sekolah baik secara akademik maupun sosial pelajar perlu hidup disiplin. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Manfaat dari pola hidup disiplin ialah dapat mengatur waktu dengan baik agar memperoleh hasil belajar

⁴² Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 2*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), h. 35-43.

yang maksimal. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Disiplin merupakan kunci dari kesuksesan seorang pemimpin. Disiplin memang tidak mudah, tetapi dengan terus berlatih, komitmen pada perencanaan yang telah dibuat, maka akan membentuk sebuah kebiasaan yang positif dan mampu melatih diri menjadi konsisten. Dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, materi tentang kedisiplinan juga diajarkan sebagai salah satu nilai yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam kegiatan pembelajarannya, peserta didik diajarkan untuk menghayati manfaat karakter disiplin dan menyadari pentingnya memupuk dan memelihara karakter disiplin. Selain itu guru dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan menjelaskan karakter disiplin sebagai karakter utama yang perlu dimiliki jika ingin menjadi pribadi dan pemimpin yang sukses. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu melakukan kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan dan tujuan hidup. Kemudian, peserta didik mampu mengetahui dan menghayati hasil dari perilaku disiplin, akibat buruk dari perilaku tidak disiplin dan mengidentifikasi serta menjelaskan perilaku tidak disiplin yang perlu dihindari. Beberapa sikap yang hendak ditanamkan dalam sikap disiplin di antaranya komitmen, tepat waktu, perencanaan, konsisten, tekun, taat, memiliki prioritas dalam hidup dan fokus dalam mencapai tujuan.

5) Tanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu tanggung jawab juga merupakan ciri individu yang bisa diandalkan. Berani bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan. Tidak takut memikul beban tanggungjawab, sebab dengan membiasakan diri bertanggung jawab merupakan calon pemimpin yang dapat diandalkan. Di dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai tanggung jawab diajarkan sebagai salah satu materi pembelajaran. Di dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) peserta didik dirangsang untuk mengetahui dengan jelas ciri khas karakter tanggung jawab. Kemudian menunjukan proses rasa tanggung jawab terhadap sesuatu sebagai hasil pemahamannya terhadap karakter tanggung jawab.⁴³

Selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sikap-sikap yang ditanamkan di antaranya kewajiban dalam melaksanakan tugas, kesiapan menanggung resiko, amanah, berani menghadapi masalah, tidak mengelak, berbuat yang terbaik dan memahami setiap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan

6) Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

⁴³ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 2*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), h. 1-4.

baiknya.⁴⁴ Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai kerja keras yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi di antaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri- ciri pribadi pekerja keras. Selain itu, guru dan peserta didik mampu menjelaskan dampak sikap kerja keras dalam mencapai tujuan, dan peserta didik diharapkan mampu menunjukan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap yang ditanamkan sebagai tujuan dari proses pembelajaran nilai kerja keras di antaranya kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, memiliki impian yang kuat, giat, berpendirian keras, pantang menyerah, terus berharap dan bersungguh-sungguh. Ada beberapa tips yang ditawarkan agar peserta didik menjadi pribadi yang ulet, bekerja keras dan pantang menyerah, di antaranya:

- a) Tentukan cita-cita
- b) Membuat dream book
- c) Jangan takut dengan kegagalan
- d) Bersinergi dengan orang yang bersemangat tinggi
- e) Kumpulkan kata-kata bijak
- f) Membaca biografi orang besar
- g) Jangan mudah menyerah.⁴⁵

⁴⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 43.

⁴⁵ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 2*, h. 18-19.

7) Sederhana

Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak seseorang mengenyam masa pendidikannya. Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Menerapkan pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana berarti tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan.

Kesederhanaan dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan anti korupsi mencakup beberapa tujuan. Di antaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan manfaat karakter sederhana dan memahami pentingnya mengaplikasikan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga bertujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi pola hidup sederhana dan mampu menjadikan diri sebagai contoh dalam menjalani pola hidup sederhana. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menghayati akibat dari pola hidup bermewah-mewahan. Sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi, khususnya pada nilai kesederhanaan. Di antaranya sikap bersahaja, hidup tidak berlebihan dan secukupnya. Selain itu, ditanamkan juga sikap rendah hati, apa adanya dan mencapai sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.⁴⁶

8) Keberanian

Nilai keberanian antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani

⁴⁶ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 2*, h. 1-7.

bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan berani dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian, guru dan siswa bersama mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, gentar, kecut dan pantang mundur. Nilai keberanian yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi meliputi beberapa hal diantaranya, peserta didik diarahkan untuk mampu memahami dan menjelaskan dampak tindakan berani dalam bentuk pribadi yang kuat. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga mengarah pada kemampuan peserta didik untuk bertindak berani dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap yang ingin dibentuk dalam pembelajaran nilai keberanian tersebut seperti kemantapan, ketegaran dalam menghadapi masalah, percaya diri, pantang mundur, tidak memiliki rasa gentar dan takut dalam hidup. Seperti kata bijak oleh Jawarhalal Nehru “sukses bisa diraih oleh mereka yang berani untuk berbuat; jarang diraih oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya”.

9) Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa pendidikannya agar siswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.⁴⁷ Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

⁴⁷ Kemendikbud. *Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/faq> pada tanggal 26 November 2018 Pukul 13:22 WITA.

Nilai keadilan yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi memuat beberapa tujuan. Di antaranya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan adil dan menjelaskan perlunya tindakan adil dalam penyelesaian masalah. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menghindari diri dari sikap berat sebelah atau tidak seimbang. Sikap-sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran nilai keadilan pada pendidikan anti korupsi seperti obyektif, proporsional, tidak memihak, penuh pertimbangan dalam melakukan sesuatu dan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai.⁴⁸

Suatu perubahan di satu elemen dapat mendorong perubahan yang lain. Misalnya, niat perilaku diubah dan perilaku dapat merubah kognisi, reaksi afektif dan sikap. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk peserta yang berkerakter

Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam beberapa tahun lalu, harian Kompas mengulas tentang seminar Korupsi dan Pemiskinan. Jika dicermati dari tulisan yang termuat dalam harian Kompas tersebut, maka akar menyadari korupsi yang membusukkan negara dan memiskinkan rakyat tersebut terjadi karena kerusakan moral yang cukup parah dan mengakar yang seolah sudah membudaya pada para pejabat publik yang ada.

⁴⁸ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, h. 46-47.

Pada tulisan di Kompas, Jumat, 11 Maret 2011, pembentukan karakter bangsa menjadi penting, dan pendidikan selama ini dirasa hanya berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam ranah kognitif saja. Lalu bagaimana seharusnya? Sudah saatnya bahwa pendidikan lebih diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value based education*) menjadi penting untuk dilakukan. Mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian.

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: 1). Kejujuran, 2). Kepedulian dan menghargai sesam, 3). Kerja keras, 4). Tanggung jawab, 5). Kesederhanaan, 6). Keadilan, 7). Disiplin, 8). Kooperatif, 9). Keberanian, 10). Daya juang/ kegigihan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada mata pelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

d. Peran guru dalam pendidikan anti korupsi

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam pendidikan anti korupsi guru berperan dalam:

- 1) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
- 2) Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi
- 3) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak)
- 4) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:

Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, bertanggung jawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan siswa-siswi yang telah di didik sedemikian rupa.⁴⁹

Menurut Achmadi tindakan yang dilakukan secara sadar melalui suatu proses yang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil).⁵⁰

Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa, bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan ke kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.⁵¹ Pendidikan anti korupsi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi

⁴⁹ http://Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah_Perlukah, diakses tanggal 25 April 2018.

⁵⁰ Ahmad Ludjito, "Filsafat Nilai dalam Islam" dalam M. Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.16.

⁵¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Houve,), h. 2627.

melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.⁵²

Pengertian pendidikan anti korupsi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah merupakan pendidikan moral anak sampai pada tataran moral *action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral *knowing*, moral *feeling*, hingga sampai pada moral *action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terintegritas dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan

⁵²M. Amin Abdullah, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 29.

salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Pendekatan terbaik untuk memberantas korupsi dengan berhasil, dan membangun integrasi dengan lembaga pendidikan untuk reformasi di masa depan.

Menurut Baho, pendidikan anti korupsi bukan cuma berfokus pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan anti korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.⁵³ Dengan lembaga pendidikan terus memberikan ruang kepada nilai-nilai kearifan sehingga mampu mejadikan bentuk dari dukungan memerangi korupsi sejak dini.

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah.⁵⁴ Dalam memperkenalkan pendidikan anti korupsi maka dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan materi yang disusun secara sistematis dan menggunakan

⁵³ Gordon Baho. “Gepak Siapkan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Para Siswa” <http://www.kabarindonesia.com/2010/gepak-siapkan-pendidikan-anti-korupsi-untuk-para-siswa/>. (4 Mei 2010). (Diakses, 26 April 2018)

⁵⁴ Kemenag RI., *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*, (Jakarta: Kemenag, 2013), h. 10-12.

metode dan strategi. Untuk menjaga efektifitas kegiatan sosialisasi, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di antaranya:

a) Tahap pengenalan dan pemahaman, yaitu tahap dimana para siswa diberikan pemahaman yang tepat mengenai definisi dan aturan hukum tentang korupsi. Secara umum para siswa telah mempunyai kesadaran (*awareness*) yang tinggi atas kasus korupsi yang mereka peroleh dari beberapa media baik media cetak maupun elektronik. akan tetapi pemahaman mereka masih rendah dalam hal definisi dan aturan hukum mengenai korupsi.

b) Tahap pembentukan sikap, yaitu tahap dimana para siswa diberikan materi pendidikan antikorupsi yang pada dasarnya berisi penanaman nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”, dan

c) Tahap penerapan, yakni tahap dimana para siswa yang telah mendapat TOT (*Training of Trainer*) diharapkan akan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi, sehingga terwujud generasi yang bersih, transparan, dan profesional.

Beberapa bentuk dan tahapan penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah melalui kebijakan kepala sekolah dan program sekolah dalam upaya membentengi siswa dari perilaku tersebut.

1). Strategi Integrasi

Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran melalui beberapa strategi diantaranya; Pengembangan Materi Integrasi melalui pengembangan materi terutama dilakukan terhadap mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi. Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pen-dalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi.

2). Metode Integrasi

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa men-dorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu di-desain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi tertentu.

3). Media dan Sumber Belajar

Integrasi melalui media dan sumber belajar dilakukan dengan memilih penggunaan media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu, baik terhadap materi pembelajaran yang secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dimaksud maupun tidak langsung. Beberapa media dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan korupsi.⁵⁵

⁵⁵ Tim Penyusun, *Panduan Penyelenggaraan*, h. 20-26.

a) Model terintegrasi dalam mata pelajaran.

Penanaman nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

b) Model Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler OSIS, Pramuka PMR dll. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

c) Model Pembiasaan dan iklim Sekolah.

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembiasaan pada peserta didik- peserta didik Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya.⁵⁶ Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

d) Strategi guru dalam menanamkan pendidikan anti korupsi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan. Sedangkan menurut istilah mengandung makna suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran muncul istilah “strategi pengajaran (*instructional strategy*) dan atau strategi pembelajaran (*learning strategy*).⁵⁷ Strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru berperan penting dalam penanaman tersebut sehingga dapat membentuk siswa yang berkeadilan melalui proses pembelajaran.

Strategi yang telah dilakukan oleh guru di sekolah merupakan strategi inklusif yang bersifat integral dan non integral. Strategi inklusif yang bersifat

⁵⁶ Ma'as Shobirin, *Model Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar*, (Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, 2015), h. 114-115.

⁵⁷ Masitoh & Laksmi Dewi, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: DEPAG RI, 2009), h. 37.

integral merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang substansi pada materinya sudah berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, contohnya: termuat dalam mata pelajaran PKN dan Agama.⁵⁸

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan menentukan strategi secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didik dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan yang bertugas sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya, baik secara formal maupun non formal menuju *insan kamil*. Sedangkan peserta didik adalah sosok manusia yang membutuhkan pendidikan dengan seluruh potensi kemanusiaannya untuk dijadikan manusia susila yang cakap dalam sebuah lembaga pendidikan formal.

Ada tiga aspek yang dikembangkan dalam kegiatan pendidikan. Aspek tersebut terdiri dari: aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Berikut merupakan penjabaran dari ketiga aspek tersebut:⁵⁹

⁵⁸ Andhika Pratama dan Sumaryat, *Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 2, Januari 2015. <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/viewFile/6273/3321>

⁵⁹ Muhammad Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2012), h. 34.

a). Aspek kognitif

Aspek kognitif berfungsi untuk mengembangkan wacana intelektual anak didik yang dilandasi dengan pembentukan kecerdasan secara proporsional melalui latihan membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara.

b). Aspek psikomotorik

Aspek psikomotorik berarti kemampuan peserta didik dalam mengembangkan potensi kreativitas dan keterampilan yang dimilikinya sebagai latihan dalam mengasah kemampuan berkarya nyata. Kemampuan dalam kreativitas, erat kaitannya dengan konsistensi dan komitmen anak didik untuk terus berupaya mengembangkan potensi lahiriahnya agar berkembang secara maksimal.

c). Aspek afektif

Aspek afektif merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan yang sangat determinan dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku peserta didik.

Berdasarkan komponen yang telah dijelaskan di atas, maka perlu adanya keseimbangan agar siswa dapat mencapai kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Faktanya bahwa kelompok pelaku korupsi merupakan kelompok terpelajar maka hal itu mengundang tanya, kemana cerdas emosional dan spiritual yang ia miliki? Pelaku korupsi tentunya seseorang yang cerdas intelektual, karena ia merupakan pejabat dan mampu mengatur tindaknya. Namun jika ia memiliki kecerdasan spiritual ia akan merasa malu untuk berbuat hal-hal tercela, misalnya korupsi.

Tujuan pengembangan pendidikan anti korupsi di antaranya ialah:

- h) siswa memiliki pemahaman sejak dini mengenai apa itu tindak pidana korupsi.
- i) Siswa memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindakan korupsi (*individual competention*).
- j) Siswa mampu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan korupsi dengan cara memberikan peringatan kepada orang tersebut.
- k) Siswa mampu mendeteksi adanya tindakan korupsi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang terkait.⁶⁰

Tujuan yang ingin dicapai PAK adalah: 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.⁶¹

e. Tujuan Pendidikan anti korupsi

Pencegahan korupsi melalui pendidikan harus dilakukan secara terus menerus (*continue*), karena pendidikan merupakan salah satu harapan dan sarana yang cukup efektif dalam melahirkan generasi yang berkualitas. Menurut Ivan Haidar, pendidikan antikorupsi didasarkan pada upaya preventif dan preservatif.

⁶⁰ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 118.

⁶¹ PGRI-JATEG, *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah*, (Semarang 2016)<http://pgri-jateng.info/archive/read/153/penanaman-nilai-nilai--anti-korupsi-di-sekolah>, (Diakses 13 Mei 2018).

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah internalisasi sikap permissive atas tindakan korupsi, sedangkan upaya preservatif bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemampuan resistensi bagi individu atau elemen sosial yang sudah menyerap nilai-nilai anti korupsi.⁶²

Tujuan pendidikan anti korupsi dengan berlandaskan pada upaya preventif dan preservatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Membangun sikap dan perilaku anti korupsi.
- 2) Membentuk kesadaran akan bahaya korupsi.
- 3) Mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan.
- 4) Membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif dalam melahirkan generasi baru yang lebih jujur dan anti-korupsi.⁶³

Menurut Muhammad Nuh, program pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sebab, dengan begitu maka mereka akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif. Bahkan, ketika mendengar korupsi saja mereka sudah alergi.

3. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi

Dalam pendidikan anti korupsi terdapat nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam segala aktivitasnya. Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar kedalam sikap dan perilaku sehari-hari.

⁴⁸ Azyumardi Azra, “*Pendidikan Anti-korupsi*” dalam harian (Republika, 24 Agustus 2006), diakses pada tanggal 24 september 2018.

Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi.

Menurut Jalaluddin nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat diinterpretasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.⁶⁴

a. Nilai kejujuran (*lempu*)

Secara etimologis, *lempu* berarti “lurus” yang merupakan antonim dari kata ‘bengkok’. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Misalnya, *laleng malempu* artinya jalan yang lurus. Dengan demikian antonim kata-kata tersebut yaitu curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Kejujuran merupakan sumber amanah, sebab inti amanah itu adalah kejujuran dan tanggung jawab.⁶⁵

Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika merujuk pada pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kejujuran yang diajarkan sebagai sebuah materi belajar memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan

⁶⁴ Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), h. 189.

⁶⁵ Yusuf sebagaimana dikutip dari Muh Sanusi Baco, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, *Taushiyah dalam rangka Diskusi tentang Sertifikasi Dai yang di Prakarsai oleh Pengurus NU Wilayah Sulsel*, Makassar, 19 Maret 2015. Yusuf, diakses 23 agustus 2018.

menjelaskan manfaat karakter jujur bagi orang lain dan diri sendiri. Selain itu peserta didik diajarkan tentang pentingnya memupuk karakter kejujuran dalam hidup. Selanjutnya, dalam aktivitas belajar mengajar, guru dan peserta didik bersama-sama mengidentifikasi karakter jujur sebagai karakter utama yang perlu dimiliki dan menjelaskan dampak perilaku tidak jujur bagi kehidupan. Sikap yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah berkata benar, bertindak benar, terbuka dan mampu menghargai diri sendiri.⁶⁶

Karakter jujur (*lempu*) juga sangat dijunjung oleh orang-orang Luwu sebagai landasan kehidupan sehari-hari sejalan dengan ajaran Islam dimana agama yang mengajarkan kejujuran dan kebenaran. itu mengandung arti adanya ketulusan hati, kebeningan jiwa, *mindset* positif, tidak iri, dan sebagainya. Sedangkan suci dalam tindakan adalah menjaga hal-hal yang memalukan, baik dalam takaran budaya maupun perspektif agama. Dalam konteks penyelenggaraan kemasyarakatan dan ketatanegaraan “*paccing*” bermakna tidak melakukan korupsi dan bentuk kecurangan lainnya, sebab hal itu merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*lempu*). Jika kejujuran telah hilang maka *siri*’ (harga diri) juga akan hilang.

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa’ Toakkareng, Tociung menyatakan:

⁶⁶ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), h. 39-40.

Artinya:

Ciri-ciri kejujuran ada delapan hal:

Menempatkan di atas yang pantas di atas
 Menempatkan di bawah yang pantas di bawah
 Menempatkan di kanan yang pantas di kanan
 Menempatkan di kiri yang pantas di kiri
 Menempatkan di dalam yang pantas di dalam
 Menempatkan di luar yang pantas di luar
 Menempatkan di belakang yang pantas di belakang
 Menempatkan di depan yang pantas di depan.

Pappaseng tersebut menyampaikan pesan bahwa kejujuran itu berarti menilai sesuatu secara objektif, menempatkan sesuatu menurut posisinya, dan menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana.⁶⁸ Banyak manuskrip tradisional (*lontara*'), konsepsi kepemimpinan tradisional di Sulawesi Selatan diuraikan dengan cukup jelas. *Paseng* merupakan sebagian nasehat yang diucapkan *To Ciung Maccae Ri Luwu* (penasehat Datu Luwu, yang memiliki pengetahuan luas, utamanya dalam hal pemerintahan), sekitar abad ke 15, kepada *La Manussa To Akkaranggeng*, calon Datu Soppeng *Sonrongpole* sebelum menduduki tahta kerajaan di Soppeng, *La Manussa* diperintahkan oleh ayahnya untuk berguru pada *To Ciung Maccae Ri Luwu* mengenai ilmu dalam kepemimpinan (pemerintahan).⁶⁹

Dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum *La Manussa To Akkaranggeng* (*La Baso*) dinobatkan menjadi Datu Soppeng, ia meminta waktu untuk pergi

⁶⁸ Ambo Enre, Fachruddin, dkk. *Pappasenna To Maccae ri Luwuq sibawa Kajao Laliddong ri Boné*. Ujung Pandang: Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo. 1985/1986.) diakses tanggal 9 Oktober 2018. <http://syamsudduhaa.blogspot.com/2013/10/pendidikan-nilai-dan-karakter-dalam.html>

⁶⁹ A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 131.

belajar konsep ketatanegaraan kepada *To Ciung Maccae ri Luwu* pada Abad XVI. Yang dimaksud dengan *To Ciung Maccae ri Luwu* yaitu *La Menggu To Mennang*. Pada masa pemerintahannya, beliau di bantu oleh *La Menggu To Mennang* yang memangku jabatan sebagai *Makkadangnge Tana ri Ware' (Opu Patunru)*. *La Menggu To Mennang* inilah yang mengajukan usul kepada *Pajung* atau Datu agar dilakukan perubahan pada struktur *Pakkatenni Ade'*. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menambah kesempurnaan *Pabbate'-bate'* (aparatus). Dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Luwu sejak *Pajung* atau Datu Luwu sampai *Pajung* atau Datu terakhir (Andi Jemma) mengalami beberapa kali perubahan yang substansial. Perubahan ini terjadi pertama kali periode *We Tenri Rawe*, *Pajung* atau Datu XVI.

Pada masa datu *Tenri Rawe* (1581-1611) dikenal seorang negarawan dan cendekiawan yang banyak memberikan perhatian terhadap kondisi kedatuan. Dia bernama *To Ciung*. *To Ciung* banyak memberikan ide-ide atau buah pikiran atau pesan-pesan kepada kedatuan (pemerintahan) yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kerajaan sehingga kedatuan terhindar dari kehancuran.⁷⁰

Berdasarkan buah pikiran dan pesan-pesan *To Ciung* maka lahirlah hukum dasar pemerintahan kedatuan Luwu yang berpihak kepada rakyat. Menurut *To Ciung* agar kerajaan dapat bertahan dan hidup terus maka kedatuan harus pandai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah menjadi kenyataan. Ide-ide dan pemikiran *To Ciung* sangat membantu pemerintahan pada Zaman Datu *Tenri Rawe*, karena itulah *To Ciung* mendapat gelar "*To Accana Luwu*" (Cendekiawan Luwu).

⁷⁰, Syam Zan Syukur.. *Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan Luwu*. (Jurnal Rihlah. 1: 2, 2014), h. 1-14.

Bila generasi muda Luwu memahami secara mendalam ajaran *To Ciung Maccae Ri Luwu*, yaitu *adele'* (adil), *lempu'* (jujur), *getteng* (teguh), *acca* (cerdas) *siri* (malu) nilai-nilai tersebut, agar dan memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kejujuran menjadi sendi atau pilar dan bahkan pintu masuk menjadi Islam. Oleh karenanya Rasulullah saw memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu menjaga diri dalam sikap “*shidiq*” serta melarang umatnya berbohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan. Kejujuran merupakan derajat kesempurnaan manusia tertinggi dan seseorang tidak akan berlaku jujur kecuali dia memiliki jiwa yang baik, hati yang bersih, pandangan yang lurus, sifat yang mulia, lidah yang bersih, dan hati yang diliputi oleh keimanan, keberanian dan kekuatan. Kejujuran menurut Syaih Abdul Qadir Jailani memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan tiangnya perkara. Dalam hal ini beliau berkata, ketahuilah bahwa kejujuran adalah tiang segala masalah, kesempurnaan dan ketertiban.

c. Nilai Kepedulian/Kepatuhan (*Assitinajang*)

Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian juga dapat diartikan mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (*senasib, sehina, semalu, dan sebagainya*) dan (*rasa*) setia kawan. Perasaan peduli muncul biasanya karena faktor kesetaraan atau kesamaan misalnya, satu suku, satu sekolah, seusia, *senasib*, menjadikan rasa persaudaraan itu muncul.

Nilai kepedulian juga merupakan bagian dari salah satu sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama, kepedulian juga dijelaskan secara eksplisit pada materi pelajaran. Selain ditanamkan melalui proses pembelajaran, nilai kepedulian ini juga sangat terlihat sudah tertanam pada sebagian besar peserta didik. Jadi selain dalam materi pembelajaran yang ditanamkan nilai persaudaraan antar sesama umat manusia, juga ditanamkan melalui aktivitas di luar kelas. Dengan demikian nilai kepedulian tidak terhenti pada tataran teoritis saja di dalam pembelajaran, tetapi langsung diaplikasikan ke dalam aktivitas di luar kelas.

Dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kepedulian yang menjadi materi tersendiri mengarah pada beberapa tujuan pokok. Di antaranya, guru dan peserta didik bersama-sama mampu menjelaskan pentingnya memiliki sikap peduli. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli yang merupakan kunci utama persatuan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengetahui batasan-batasan peduli dalam aktivitas sehari-hari. Sikap-sikap yang ingin diajarkan dalam proses pembelajaran, kaitanya dengan nilai kepedulian seperti misalnya rasa persaudaraan, empati, toleransi, kesetia kawatan, membela yang benar, satu rasa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan terhadap penderitaan yang dialami orang lain.⁷¹

c. Nilai Kerja Keras (*reso*)

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai kerja keras yang diajarkan

⁷¹ Rustika Tamrin, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat*, (Jakarta: 2008), h. 42-47.

dalam pendidikan anti korupsi diantaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri pribadi pekerja keras. Selain itu, guru dan peserta didik mampu menjelaskan dampak sikap kerja keras dalam mencapai tujuan, dan peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan etos kerja, sejak dahulu orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Karena akrabnya dengan air dan laut, maka sifat-sifat dinamis dari gelombang yang selalu bergerak dan tidak mau tenang itulah yang mempengaruhi jiwa dan pikirannya. Hal tersebut dilukiskan sebagai sifat dinamis, penuh semangat tanpa kenal putus asa, dan pantang mundur yang dapat dilihat dalam pappaseng berikut ini:

*‘Pura babbara sompekku
Pura gucciri gulingku Ulebbirenngi tellenngé natowalié.*

Artinya:

Layarku sudah berkembang,
Kemudiku sudah terpasang,
Kupilih tenggelam daripada kembali”

Demikianlah sifat yang hebat, pantang mundur bila ingin mencapai sesuatu. Namun, sifat hebat itu dikendalikan pula dalam pappaseng berikut ini:

*Narékkō moloiko roppo-roppo,
Rewekko mappikkirik*

Artinya:

Jika anda berjalan dan menjumpai semak belukar,
Kembalilah berpikir.

Terdapat pula sebuah *élongpugi* yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Bugis, sebagai berikut:

Résopa temmanginni
Namalomo nalétéi
Pammasé déwata

Artinya:

Hanya bekerja yang tekun
 Sering menjai titian
 Rahmat Ilahi

Sikap-sikap yang ditanamkan sebagai tujuan dari proses pembelajaran nilai kerja keras di antaranya kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, memiliki impian yang kuat, giat, berpendirian keras, pantang menyerah, terus berharap dan bersungguh-sungguh.⁷²

d. Malu (*Siri'*)

Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan.

Seorang pejabat yang tidak punya rasa malu akan menggunakan kekuasaanya untuk menindas rakyat guna memperkaya diri. Seorang pedagang yang tidak punya rasa malu, ia akan membohongi pembelinya, barang jelek dikatakan bagus, barang murah dikatakan mahal. Jika seorang pelajar tidak punya

⁷² Haddade, Muh. Naim.. *Ungkapan, Pribahasa, dan Paseng: Sastra Bugis*. Jakarta : (Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1986).

sifat malu, ia dengan mudahnya berkata kotor, menyontek, memperolok-olok teman sendiri. Sungguh, dengan tidak adanya rasa malu ini maka bencana moral dan kerusakan akhlak akan merajalela. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah swt. bukan karena selain-Nya. Pada saat kita malu berbuat sesuatu tanyalah kepada hati kita: “Apakah malu ini karena Allah swt. atau bukan?” Jika bukan karena Allah swt. bisa jadi hal itu adalah sifat malas, minder, atau rendah diri. Sifat malas, minder atau rendah diri merupakan perilaku tercela yang harus dihindari.⁷³

Berkaitan dengan harga diri. harga diri masyarakat Bugis-Luwu terkenal mempunyai nilai *siri* cukup tinggi. Namun, setinggi-tingginya harga diri seseorang, masih lebih tinggi harga diri keluarga. Orang-orang zaman dulu sangat keras untuk hal yang satu ini. Merusak nama baik keluarga dengan melakukan buruk kita di masyarakat adalah hal yang fatal.

e. Pintar (*acca*)

Masyarakat Bugis-Luwu dituntut harus pintar, cerdas, cendikia, dan kreatif. Tidak hanya pintar dalam segi akademis, tapi ia mampu secara jeli melihat kondisi sekitar. Sifat Ketegasan dan Kejujuran akan dibantu dengan proses nalar yang baik. Jadi, dari dulu orang Bugis-Luwu sudah menjadi orang pintar terbukti seperti to ciung yang digelar sebagai *to macca' ri Luwu*.

Kelima nilai budaya ini, saling terhubung satu sama lain. bagi orang Bugis-Luwu bekerja keras (*reso*) merupakan cara untuk mempertahankan harga diri (*siri*). Dalam bekerja, senantiasa bertekad (*getteng*) untuk menyelesaikan

⁷³<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-malu-contoh-sifat-malu-dan.html>
(Diakses 10 April).

pekerjaan tersebut. Selama bekerja senantiasa menjaga norma-norma (*lemphu*) dan berusaha menemukan alternatif menyelesaikan pekerjaan secara cerdas dan kreatif (*acca*). Setelah semua usaha (*reso*) dilakukannya; baru berpasrah diri kepada takdir Tuhan, tapi ia yakin takdir Tuhan tidak akan hadir tanpa usaha. Setelah berhasil dalam usahanya ia menikmati dengan membelanjakan secara wajar (*asitinajang*) dan sebagian digunakan untuk menyantuni kerabat yang memerlukan (*pesse'*). Proses dinamisasi nilai-nilai inilah yang kemudian hilang bak ditelan ombak. Jika dalam kehidupan nilai-nilai tersebut dijalankan dan senantiasa diamalkan serta tetap dipertahankan, maka kehidupan ini terasa indah dan damai

Kelima nilai ini yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Terbukti, dari 50 kota terkorup di Indonesia yang dirilis Transparency International Indonesia, daerah asli suku Bugis hanya berada pada posisi tertentu, meskipun tidak begitu baik, tapi itu menandakan bahwa masih ada pengusaha, penguasa, pribadi secara universal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti yang di atas. Jika semua kembali pada hakikatnya sebagai manusia, perilaku koruptif dapat dihilangkan.

Satuan pendidikan dengan tugas utama mendidik peserta didik menjadi manusia yang cerdas baik secara intelektual, mental, maupun spiritual, dalam realitasnya belum sepenuhnya mampu mewujudkan tugasnya tersebut. Ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, pemalas, belum dapat menentukan diri sendiri, mudah putus asa, bergaya hidup mewah bagian dari perilaku konsumtif, penakut, masa bodoh, pengumpulan tugas tidak tepat waktu, dan masih suka pilih kasih, masih sering terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah, yang

seharusnya memberi teladan justru kurang memberikan keteladanan, justru menciptakan mekanisme yang curang, tidak jujur demi tercapainya kognitif siswa semata, misalnya kebocoran soal ujian, membiarkan siswa saling bekerjasama pada saat ujian.

Hal ini juga sering terjadi pada tenaga pendidik yaitu guru, misalnya terlambat hadir di sekolah, masuk dan keluar ruang kelas tidak sesuai waktu yang ditentukan. Belum tercapainya tujuan pendidikan tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya kesamaan visi semua komponen sekolah, keterbatasan sarana prasarana, belum bakunya dan lengkapnya sistem evaluasi, dalam membiasakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian menelaah nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter untuk peserta didik oleh satuan pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran perlu dilakukan penanaman nilai.

Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran oleh peneliti diasumsikan lebih penting, dibandingkan dengan implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam manajemen sekolah dan ekstrakurikuler. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran dilaksanakan oleh semua guru secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang lebih jelas.

Sedangkan manajemen sekolah dan ekstrakurikuler, hanya dilakukan oleh sebagian guru atau anggota sekolah, harus berkomitmen kuat dalam pendidikan karakter siswanya melalui penanaman nilai-nilai kearifan dan pendidikan anti korupsi, hal tersebut didukung dengan berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain pelaksanaan konseling efektif, pemberian tugas, guru

harus mencantumkan karakter yang akan dicapai dalam pembelajaran di setiap RPP nya, pengembangan ekstrakurikuler sekolah, dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran sebagai media mengembangkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan adil peserta didik.

Derasnya golabal dan terjadinya westernisasi telah melunturkan budaya asli bangsa kita tidak terkecuali pada kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tiap individu dibutakan oleh kehidupan glamor tanpa peduli dengan dinamika kehidupan bermasyarakat di sekiarnya. Akhirnya, nilai-nilai luhur kehidupan sudah banyak yang dilupakan. Kurangnya nilai kearifan dalam hidup akan menimbulkan penyakit sosial. salah satunya korupsi. Oleh karena itu, dalam kaitannya, perlu penanaman kembali nilai-nilai kebudayaan sejak dini. Nilai-nilai kearifan lokal suku Bugis-Luwu perlu diaktualisasikan melalui jalur pendidikan dasar, pertama, dan menengah.

Dalam pendekatan pendidikan, manusia sebagai makhluk eksploratif, manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan dan membutuhkan intervensi dari luar dirinya yang disebut pendidikan.⁷⁴ Untuk itu pendidikan diperlukan sebagai upaya untuk membimbing siswa mengembangkan aspek pada dirinya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno sering mengusung slogan *Nation and Character Building*. Bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa yang besar harus diawali dengan

⁷⁴ Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), h. 182.

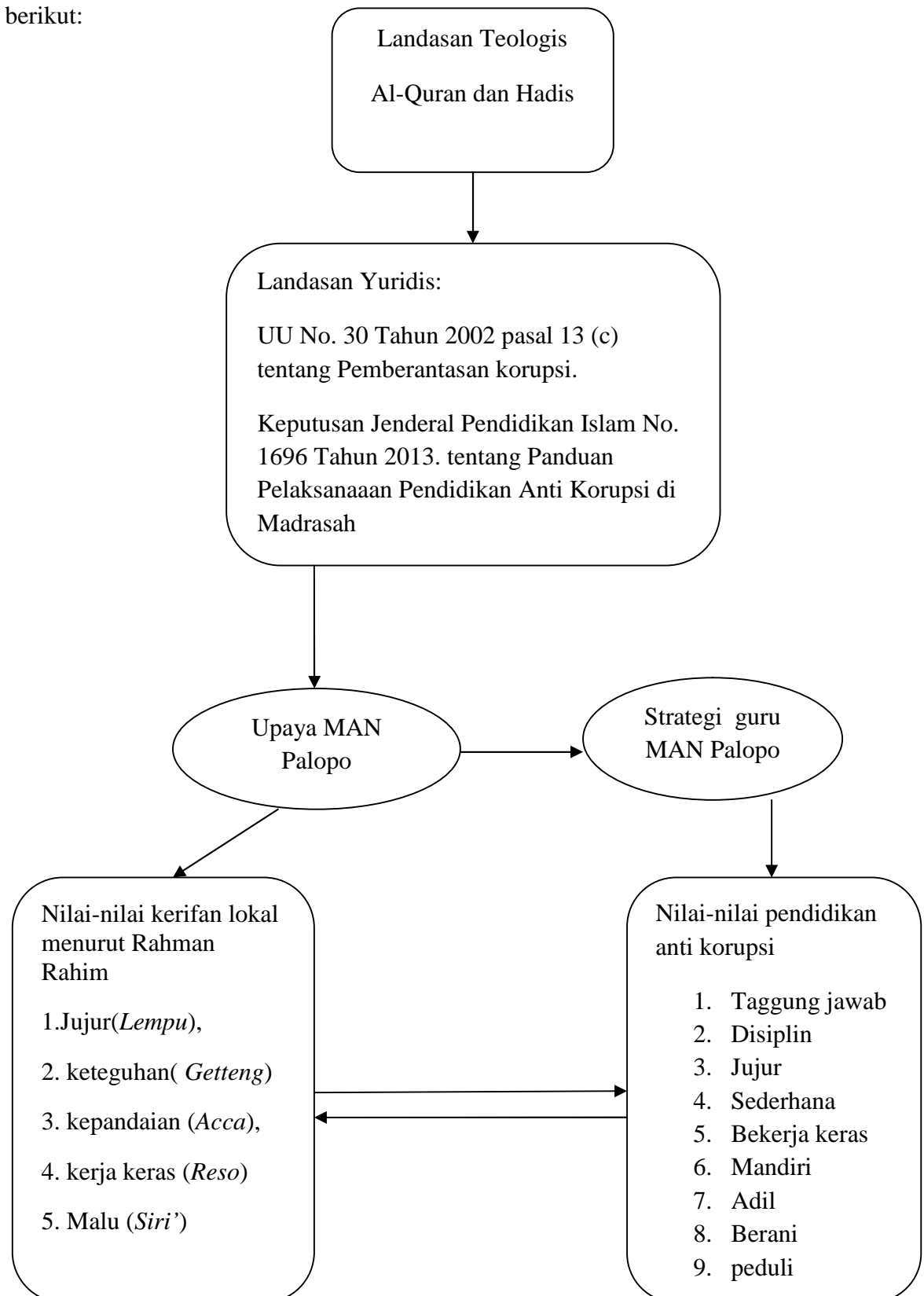
pembangunan manusia (*man behind the gun*). menyebutnya sebagai manusia pembangun, yang di antara cirinya ialah memiliki watak bermoral tinggi.⁷⁵ Untuk membentuk watak manusia agar bermoral tinggi ialah dengan pengembangan potensi positif melalui pendidikan.

C. Kerangka Pikir

Maraknya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh para politisi, pejabat dan pemangku kebijakan. Membuat bangsa Indonesia terpuruk dan krisis terhadap nilai-nilai moral yang berketuhan, oleh karena itu patut dimulai dari generasi ke generasi untuk memberikan pemahaman agama dan pengertian terhadap perilaku-prilaku yang tercela seperti tindakan korupsi melalui lembaga pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar memberikan pemahaman dan pencegahan perbuatan korupsi yang dilakukan melalui lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi tidak hanya pada proses pembelajaran namun sangat penting untuk dielaborasi dengan nilai-nilai masyarakat setempat untuk menjadi landasan kebiasaan kehidupan sehari-hari.

⁷⁵ Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, h. 187.

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Bersifat deskriptif kualitatif, di mana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu masalah mengenai pendidikan anti korupsi melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal Luwu yang terdapat pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Palapo, penelitian ini berusaha menjawab dan memberikan solusi pada lembaga pendidikan tentang pentingnya penerapan pendidikan anti korupsi melalui pendekatan nilai-nilai kearifan lokal, untuk itu peneliti terjun langsung di lokasi untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai langkah untuk menganalisis dan berusaha menjawab permasalahan yang terdapat pada sekolah tersebut mengenai nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan anti korupsi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara diobservasi, diminta untuk memberikan informasi, pendapat, tanggapan, pemikiran, persepsinya serta

¹ M. Djamal, *Paradigma penelitian kualitatif edisi revisi*, (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2015), h. 9.

pemahaman yang diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan partisipan, dan melalui penguraian tentang situasi-situasi dan peristiwa.² Adapun tesis ini berbentuk penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan. Penggunaan tipe ini dilakukan dengan alasan karena peneliti berusaha menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak dan sebagainya. Jadi penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, alamiah tanpa rekayasa sehingga data yang didapat diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran tentang nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pendekatan Pedagogis, psikologis, dan sosiologis. yakni mendekati secara mendalam suatu

² Nurtain, *Analisis Item*, (Cet. I; UGM, 2001), h. 36.

fenomena (peristiwa-kejadian, dan atau fakta) yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan atau kedahsyatan fakta tersebut mempengaruhi masyarakat.

a. Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan kepada obyek penelitian sehingga mereka tidak merasa canggung untuk terbuka dalam rangka memberikan data, informasi, pengalaman, serta bukti-bukti yang ditanyakan oleh peneliti kepada informan yang dibutuhkan, dapat juga dikatakan konsep memperoleh sebuah data yang hampir mendekati masalah dengan menggunakan teori-teori pendidikan.

b. Pendekatan teologis, normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan suatu keyakinan tertentu dalam hal ini keyakinan yang dimaksud adalah beragama Islam yang mayoritas masyarakat Luwu yakni, untuk itu dalam nilai-nilai kearifan lokal yang berbudaya dan tidak lepas dari nilai ajaran Islam.

c. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan sosial-kultrul dari perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalani kehidupannya melalui nilai-nilai kearifan yang menjadi filosofi kehidupan masyarakat Bugis terkhususnya masyarakat Luwu pada umumnya, dan dapat diamati pada generasi yang sedang menjalani pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo yang dipandang sangat representatif untuk mewakili sekolah menengah atas yang ada di

kota Palopo sebagai obyek penelitian yang dari sekian banyaknya sekolah di tanah Luwu. Sejalan dengan tahapan waktu penelitian telah dilakukan sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2018.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan informasi atau ringkasnya sumber data dalam penelitian yang merupakan informan dari data tersebut diperoleh.³ Untuk menjangring sebanyak mungkin informasi, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup berkaitan dengan kajian penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ada beberapa informan, yaitu:

1. Pendidik yang dimaksud di sini adalah kepala sekolah, guru serta seluruh orang-orang yang memberikan pendidikan kepada peserta didik, baik melalui proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah.
2. Sekolah yang dimaksud adalah tempat penelitian di mana iklim sekolah yang menggambarkan nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan tersebut.

Adapun penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksana dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Luwu di sekolah tersebut, penelitian ini akan dilakukan pada objek kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran

³ Suharismin Arikunto, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

serta peserta didik, yang dianggap peneliti dapat memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam mendukung pendidikan anti korupsi di lembaga sekolah.

Adapun objek dari penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri Palopo, guru serta peserta didik yang terdapat pada madrasah tersebut, dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di madrasah.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang diambil tidak terlepas dari metode pengumpulan data, dan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian.

a). Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau fenomena baik berupa manusia, benda mati, kegiatan, dan alam.⁴ Metode observasi yang peneliti gunakan adalah metode observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam

⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 87.

penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai proses pegintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi nilai peserta didik.

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dengan terlibat langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat kegiatan sekolah serta aktivitas belajar mengajar mengenai pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi di madrasah aliyah negeri kota Palopo.

b). Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Tujuan dari instrument ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pendidikan anti korupsi. Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah guru serta siswa. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Penelitian ini tidak hanya lansung percaya pada apa yang dikatakan informan, tetapi perlu mengecek dalam pengamatan.⁶

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 183.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 101.

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa Madrasah Aliyah Negeri Palopo yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

c). Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memberi data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan majalah, notulen, dan sebagainya.⁷ Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian dalam penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar responden penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan kondisi sekolah yang sudah peneliti pilih. Kemudian, data kurikulum pendidikan yang berkaitan nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pendidikan anti korupsi yang mana data tersebut bisa diperoleh dari: buku, modul guru, RPP, atau catatan-catatan lain yang tersedia.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

E. Validitas dan Realibilitas Data

Sebuah penelitian kualitatif memiliki standar validitas data (keabsahan data). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁸ Uji validitas data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *credibility*. *Credibility* adalah dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan memberchek.⁹ Sumber data yaitu sumber dari mana data itu diperoleh. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini data yang diambil meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada dua sumber data meliputi: sumber data utama (primer), yaitu sumber data yang pertama kali diteliti dan merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁰

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru-guru madrasah aliyah negeri atau elemen-elemen yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari sejarawan tanah Luwu, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data

⁸ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

⁹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 87.

¹⁰ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 193.

sekolah, guru, karyawan dan siswa, struktur organisasi, daftar inventaris serta buku-buku penunjang, dan lain sebagainya.

Ada dua data yang diharapkan dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, pertama, data yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Kedua, data yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Sedang, analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen seperti, dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang sudah didapat dari lapangan. Selanjutnya memilah-milah dan mengelola data yang ada, kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu data tersebut termasuk kepada data perencanaan, pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo. Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriterium tertentu. Menurut Lexy J.

Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*tranferbility*), kebergantungan (*dependenbility*), kepastian (*conformability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Palopo, guru kelas, dan Kepala Sekolah. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari ketiga teknik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait penerapan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Kota Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo

Madrasah Aliyah Negeri atau disingkat MAN Palopo adalah alih fungsi dari PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Palopo. PGAN Palopo awal mulanya didirikan pada tahun 1960, yang namanya adalah PGAN 4 Tahun (setingkat SLTP), kemudian masa belajarnya ditambah 2 tahun menjadi PGAN 6 tahun (setingkat SLTA). Hal itu berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan 1986. Kemudian pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 masa belajarnya berubah menjadi tiga tahun setelah MTs mengalami perubahan dari PGAN 4 Tahun, setingkat dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada waktu itu.

PGAN Palopo yang belajar selama tiga tahun itu berakhir pada tahun 1993. Dan dua tahun menjelang masa belajar PGAN Palopo berakhir, yaitu pada tahun 1990 dialihfungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Palopo. Hal itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI., nomor 64 Tahun 1990 pada tanggal 25 April 1990. Selama rentang waktu dari 1990 sampai akhir tahun 2007, dari PGAN Palopo lalu beralih fungsi menjadi MAN Palopo, telah mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah, seperti di bawah ini.¹

¹ Maida Hawa, Kepala MAN Palopo, *Wawancara*, di Palopo, 10 Oktober 2018

No.	Nama Sekolah	Kepala Sekolah	Periode
1.	PGAN 4 Tahun	Kadis	1960 – 1970
2.	PGAN 4, 6, 3 Tahun	Drs. H. Ruslin	1970 – 1990
3.	PGAN/MAN	H. Abd. Latif P, BA.	1990 – 1996
4.	MAN	Drs. M. Jahja Hamid	1996 – 2001
5.	MAN	Drs. Somba	2001 – 2003
6.	MAN	Drs. H. Mustafa Abdullah	2003 – 2005
7.	MAN	Nursjam Baso, S.Pd	2005 – 2007
8.	MAN	Dra. Maida Hawa	2007 - Sekarang

Sumber Data: Dokumentasi MAN Palopo 5 Oktober 2018

a. Profil Madrasah Aliyah Negeri Palopo

Nama sekolah : Madrasah Aiyah Negeri (MAN) Palopo

Nomor statistik : 131173730001

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Palopo

Kecamatan : Bara

Kelurahan : Balandai

Jalan : Dr. Ratulangi

Kode Pos : 91914

Telepon : 0471 21671

Facimile/Fax : 0471 21671

Daerah : Perkotaan

Status Madrasah : Negeri

Akreditasi : A

Surat keputusan : Nomor 64 Tahun 1990 Tanggal 25 April
1990

SK ditandatangani oleh : Menteri Agama

Tahun berdiri	: Tahun 1990
Tahun penegerian	: Tahun 1990
Status Madrasah	: Milik Sendiri
Kegiatan belajar mengajar	: Pagi
Luas madrasah	: 39, 279 M
Alamat madrasah	: Dr. Ratulangi Balandai Kota Palopo
Organisasi penyelenggara	: Pemerintah

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Madrasah Aliyah Negeri Palopo

Terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan menguasai IPTEK serta bersaing di tingkat lokal maupun global.

Misi Madrasah Aliyah Negeri Palopo yakni:

- 1) Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai keislaman dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Melaksanakan pemebelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga siswa dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki;
- 3) Meningkatkan motivasi dan percaya diri dalam belajar baik secara pribadi maupun secara kelompok;
- 4) Membudayakan disiplin dan etos kerja yang produktif.

c. Tujuan Sekolah

- 1) Membentuk peserta didik memiliki imtak, akhlak dan budi pekerti yang baik.
- 2) Mempersiapkan peserta didik untuk mampu menghadapi era golbalisasi.

- 3) Memiliki kemampuan mengapresiasi seni dan budaya baik lokal, nasional maupun internasional.
- 4) Mengembangkan etos kerja dan profesionalisme warga madrasah dan pelayanan pendidikan.
- 5) Mengembangkan layanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.
- 6) Data guru dan siswa serta sarana prasarana MAN Palopo

Data Guru dan Staf MAN Palopo

No	Guru PNS	Guru Honorer	Staf PNS	Staf Honorer
	38	5	4	9
Jumlah $38+5+4+9=56$				

Sumber Data: Dokumentasi MAN Palopo 5 Oktober 2018

Guru adalah unsur yang membantu peserta didik dalam pendidikan yang bertugas sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya, baik secara normal maupun nonformal menuju insan kamil. Sedangkan peserta didik adalah sosok manusia yang membutuhkan pendidikan dengan seluruh potensi kemanusiaannya untuk dijadikan manusia nilai-nilai anti korupsi.

Keadaan Siswa MAN Palopo Tahun Ajaran 2018/2019.

NO	Nama Bidang Keahlian	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Total
1.	MIA	X	97	254
		XI	81	
		XII	76	
2.	IIS	X	91	211
		XI	59	
		XII	61	
3.	IIK	X	102	232
		XI	67	
		XII	63	
4.	IBB	X	30	85
		XI	30	
		XII	25	
Jumlah				785

Sumber Data: Dokumentasi MAN Palopo 5 Oktober 2018

Berdasarkan tabel diatas peneliti melihat bahwa jumlah populasi siswa Madarasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo sangat banyak, sehingga dengan jumlah populasi siswa yang ada, menandai bahwa adanya minat masyarakat serta respon agar anak-anak mereka bisa masuk madrasah tersebut kelak bisa keluar menjadi alumni atau tenaga yang berprestasi dibidang masing-masing, seperti Matematika dan ilmu Alam (MIA), Ilmu-ilmu Sosia (IIS), Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB), Ilmu-ilmu Keagamaan (IIK), pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan teknologi, sebagaimana visi dan misi yang ada di madrasah, namun dengan banyaknya populasi siswa yang ada, maka menjadi tantangan bagi para guru di madrasah. Banyaknya jumlah populasi yang ada, maka tentu setiap perilaku dan karakter berbeda-beda sehingga untuk mengantisipasi perbedaan karakter tersebut, agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan penanaman nilai-nilai Islam.

Keadaan Sarana Pendidikan MAN Palopo

No	Jenis Sarana	Keadaan			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang Kelas	23	-	-	23
2	Ruang	1	-	-	1
3	Perpustakaan	1	-	-	1
4	Ruang Guru	1	-	-	1
5	Ruang Kepala	5	-	-	5
6	Sekolah	2	-	-	2
7	Ruang	12	-	2	14
8	Laboratorium	2	-	-	1
9	Ruang Komputer	2	-	-	2
10	Kamar mandi/WC	1	-	-	1
11	Ruang UKS	1	-	-	1
12	Ruang Tata Usaha	1	-	-	2
13	Musalla	2	-	-	2
14	Ruang Wakasek	1	-	-	1
15	Ruang Guru BK/BP	1	-	-	1
16	Aula	1	-	-	1
17	Ruang Rapat	1	-	-	1
18	Ruang pramuka	1	-	-	1
19	Ruang Osis	1	-	-	1
20	Ruang	1	-	-	1
21	Keterampilan	1	-	-	1
22	Lap. Bulu Tangkis	-	-	-	1
23	Lap. Tennis Meja	1	-	-	1
24	Lap. Volly	1	-	-	1
25	Lap. Meja	1	-	-	1
26	Kantin	-	-	-	

Sumber Data: Dokumentasi MAN Palopo 5 Oktober 2018

7) Keadaan kegiatan ekstrakurikuler yang di selenggarakan di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Palopo

Salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu lembaga serta bisa di kenal di tingkat nasional adalah tersedianya kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam peningkatan atau pengembangan potensi siswa di bidang non akademik. Maka dari itu pelaksanaa kegiatan ekstrakurikuler pada setiap lembaga pendidikan merupakan suatu

keharusan. Oleh karena itu, berdasarkan informasi dari pihak tata usaha, kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dapat di lihat pada beberapa tabel sebagai berikut:

Keadaan Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Palopo

No.	Jenis Ekstrakurikuler	Diselenggarakan ? (Ya=/Tidak=0)	Jumlah Siswa yang Mengikuti
1.	Pramuka	1	350
2.	Palang Merah Remaja (PMR)	1	45
3.	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa	1	350
4.	Paskibraka	1	35
5.	Karya Ilmiah Remaja (KIR)	1	5
6.	Matematika	1	50
7.	Bola Basket	1	20

Sumber Data: Dokumentasi MAN Palopo 5 Oktober 2018

Penanaman nilai-nilai anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo juga dilakukan di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong terjadinya integrasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti Korupsi melalui aktivitas dan pengalaman ekstrakurikuler.

Penelitian ini melibatkan beberapa responden sebagai subjek penelitian.

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

No.	Nama Responden	Jenis Kelamin L/P	Jabatan	Ket.
1.	Dra. Maida Hawa, M.Pd.I	P	Kepala Sekolah	
2.	Drs. Bahrum, M.Pd.I	L	Waksek. kurikulum	
3.	Drs. Abd.Madjid, M.Pd.I	L	Guru	
4.	Dra. Sitti Nun Ainun Yahya	P	Guru	
5.	Muh. Yunus, S.Pd	L	Guru	
6.	AlFathan Syamsuddin	L	Siswa	
7.	Arianti Mega Hamsul	P	Siswa	
8.	Kurniawan	L	Siswa	
9.	Emi	P	Siswa	
10.	Fazil Nor	L	Siswa	
11.	M. Riza Agusti	L	Siswa	
12.	Cinta Qiraniah Putri	P	Siswa	
13.	Akbar Saputra	L	Siswa	

2. Relevansi Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo

Penanaman nilai merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik agar menjadi generasi bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Penanaman nilai merupakan wujud nyata penerapan ilmu pengetahuan dan pemahaman peserta didik dalam menyerap mata pelajaran, dan membentuk perilaku hidupnya sehari-hari.

Penanaman nilai dalam konteks ini adalah usaha untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu membentengi diri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, seperti masalah korupsi.

Pendidikan menjadi penting karena perannya dapat dilakukan untuk membentengi diri dari praktik korupsi. Menurut Maida Hawa penanaman nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan di madrasah ini, sesuai dengan K.13 di mana nilai-nilai tersebut seperti; jujur (*lemphu*), bertanggung jawab (*getteng*), kerja keras, (*reso*), disiplin, adil dan sederhana. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkaitkan materi-materi dalam pelajaran dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, melalui penyampaian pesan dan nasihat kepada peserta didik tentang bahaya korupsi. Di dalam pembelajaran, pendidik tidak hanya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal aspek pengetahuan semata, namun pada penanaman nilai-nilai sehingga peserta didik memiliki dorongan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.²

Sedangkan menurut Abdul Majid bahwa nilai-nilai kearifan lokal sangat relevan dengan nilai-nilai pelajaran agama, apalagi di madrasah ini, menekankan untuk menghindari perbuatan tercelah seperti korupsi.³ Mata pelajaran yang juga memegang peranan penting pada pendidikan moral adalah pendidikan agama. Mata pelajaran akidah akhlak menjadi begitu penting merespon keadaan korupsi yang kian akut di republik ini. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi harus mampu diajarkan tidak hanya pada tataran kognitif saja, namun

² Maida Hawa Kepala MAN Palopo, *Wawancara*, 14 Oktober 2018.

³ Abd. Majid, *Guru al-Quran Hadis di MAN Palopo*, 15 Oktober 2018.

terdapat keseimbangan pada aspek psikomotoriknya. Sehingga peserta didik mampu memiliki kemauan kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai anti korupsi sebagai karakter yang tangguh.

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi tentu sangat relevan sebagaimana yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo sebagai upaya untuk menghentikan mata rantai berkembangnya korupsi di negeri ini. Tujuannya adalah untuk mendidik moral peserta didik agar memiliki karakter dan akhlak yang baik. Analisis terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang termasuk di dalamnya ada upaya dan strategi pada pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.

Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memuat semua komponen pendidikan dan pengembangan karakter siswa. Mulai dari pengembangan karakter intelektual, religius, maupun sosial siswa. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan merumuskan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran tematik berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang berbasis pengembangan karakter peserta didik.

Selain itu kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan Islam seperti halnya Madrasah Aliyah, menyajikan muatan materi keislaman yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan sekolah umum. Materi-materi keagamaan

banyak diajarkan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Al-Qur'an Hadits, dan Bahasa Arab. Maka Pendidikan anti korupsi akan lebih mudah diintegrasikan kedalam mata pelajaran tersebut dengan menanamkan nilai-nilai hidup berdasarkan perintah Allah swt dan suri tauladan dari Nabi Muhammad saw. Sehingga kurikulum pendidikan Islam akan dapat menjadi pondasi bagi siswa agar memiliki wawasan keagamaan yang luas dan dapat terhindar dari perbuatan tercela seperti halnya korupsi.

Dalam penyampaian pendidikan anti korupsi diperlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk mencermati setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum sehingga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi.

Kemampuan profesionalisme guru sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan anti korupsi. Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo guru terkadang mengalami kesulitan untuk mengemas atau menyisipkan materi pelajaran dengan pendidikan anti korupsi dalam topik pembelajaran. Topik khusus tentang upaya pemberantasan korupsi dalam Kurikulum 2013 memang tidak ada, oleh karena itu guru harus jeli dan memiliki kemampuan untuk menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam tema pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, guru harus melakukan kerjasama dan saling sharing dengan guru lainnya agar tidak mengalami kesulitan dalam menyisipkan nilai pendidikan anti korupsi dalam materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan dan dikaji dari penelaahan kepustakaan, maka penanaman Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo, diantaranya:

a). Nilai Tanggung jawab (*getteng*)

Nilai tanggung jawab terwujud dalam proses pembelajaran. Seperti ketika observasi pada waktu pembelajaran al-Quran hadis dengan tema betapa semangatnya aku dan berkompetisi dalam kebaikan guru selalu memberikan arahan kepada peserta didik untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya kepada sesama. Kemudian guru juga mengaitkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin negara, yang merupakan orang berilmu yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai tanggung jawab yang merupakan salah satu nilai dari pendidikan anti korupsi dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui materi pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi tentang semangat menuntut ilmu saja, namun di dalamnya disisipkan nilai tanggung jawab yang disertai contoh kongkritnya dalam kehidupan. Dengan demikian peserta didik dapat memahami dan menanamkan nilai tanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar menuntut ilmu dengan baik sekaligus menjadi masyarakat yang mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

b). Nilai kedisiplinan

Nilai kedisiplinan selain termuat dalam kompetensi inti juga termuat dalam proses pembelajaran melalui materi pelajaran yang diajarkan. Seperti yang terlihat di dalam materi aspek akhlak yakni memahami dan menampilkan perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan bekerja keras, guru tidak hanya mengajarkan pada tataran teori saja. Rupanya melalui observasi yang peneliti

lakukan, guru juga mempraktekannya dalam pembelajaran. Terlihat guru selalu menanyakan keterlambatan siswa ketika masuk kelas memperhatikan kerapiannya dan kesiapannya dalam belajar, bahkan tidak boleh memperbolehkan mengikuti pembelajaran jika sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan proses penanaman nilai kedisiplinan kepada peserta didik agar membiasakan dirinya menghargai waktu dan menyadari pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai kedisiplinan yang ditanamkan rupanya sesuai dengan Modul Pembentukan Karakter Genarasi Anti Korupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanamkan nilai kedisiplinan dengan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan, karena disiplin memang tidak mudah, tetapi dengan terus berlatih, komitmen pada perencanaan yang telah dibuat, maka akan membentuk sebuah kebiasaan positif dan mampu melatih diri menjadi konsisten.⁴

c). Nilai Kejujuran (*lempu*)

Kejujuran merupakan nilai penting yang perlu diajarkan kepada peserta didik, tidak terkecuali pada mata pelajaran Akidah Akhlak Di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak nilai kejujuran yang merupakan salah satu nilai moral yang diajarkan sebagai bagian dari unsur aqidah, karena sifat tersebut merupakan implikasi dari memahami dan mengamalkan keimanan terhadap Rasulullah saw. Keimanan tersebut dijalankan dengan jalan meneladani sifat luhur dari utusan-utusan Allah swt.

⁴ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA Kelas 2*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), h. 35-43.

Nilai kejujuran selain terdapat pada materi pelajaran tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi yang ditanamkan melalui proses pembelajaran. Seperti pada saat penulis melakukan wawancara kepada salah satu guru akidah akhlak bahwa dalam proses pembelajaran hingga penilaian, guru menekankan pada penanaman sifat jujur pada peserta didik. Kejujuran yang ditunjukkan dengan perbuatan tidak mencontek selalu diarahkan oleh guru. Untuk evaluasi guru menggunakan tes tertulis, namun dalam pelaksanaannya guru hanya memberi 30% untuk penilaian tes tertulis, kemudian 70% merupakan evaluasi setiap proses pembelajaran. Di antaranya, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran, kejujuran saat mengerjakan tugas dan guru juga dengan tegas tidak akan memberikan penilaian pada pekerjaan peserta didik yang pekerjaannya merupakan hasil menyontek.

Hal tersebut secara tidak langsung guru menanamkan nilai kejujuran kepada setiap peserta didik, sekaligus memberikan contoh nyata dampak perilaku tidak jujur dengan tidak memberikan nilai dari hasil menyontek. Sikap yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran juga sangat menekankan kepada peserta didik untuk berkata benar, bertindak dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian nilai kejujuran dapat mengakar di dalam diri peserta didik sehingga dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

d). Nilai kesederhanaan

Kesederhanaan merupakan salah satu nilai penting yang diajarkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Nilai tersebut merupakan salah satu sifat terpuji, oleh karena itu diajarkan sebagai salah satu dari pembelajaran akhlak. Selain itu

kesederhanaan merupakan tauladan yang diajarkan Rasulullah saw dan meyakiniya merupakan salah satu pengamalan dari mengimani Rasulullah. Seperti observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kesederhanaan ditampakkan oleh para guru yang merupakan panutan bagi peserta didiknya. Seperti tidak memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan di sekolah, dalam proses pembelajarannya pun guru senantiasa bersikap ramah dan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.

Hal tersebut tentunya salah satu upaya untuk menanamkan nilai kesederhanaan terhadap peserta didik, dengan memberikan contoh langsung pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan sikap rendah hati yang selalu ditampilkan oleh guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian peserta didik dapat mengidentifikasi pola hidup sederhana dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

e). Nilai kerja keras (*reso*)

Nilai kerja keras merupakan salah satu nilai pendidikan anti korupsi yang sangat ditanamkan dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta didik sebagai berikut:

“Kalau di dalam pelajaran kan kita selalu dituntut untuk menghafal ayat-ayat al-Quran atau hadis yang terkait dengan materi pelajaran, nah disitu kita dituntut untuk kerja keras dalam menghafal. Karena nantinya juga di cek hafalannya sewaktu- waktu tanpa terduga, jadi kita tetap harus terus menghafal, kalau nanti di cek kita tidak hafal kan malu”.⁵

Dengan demikian, secara tidak langsung nilai kerja keras ditanamkan untuk melatih siswa untuk membiasakan sikap pantang menyerah dalam

⁵ Emi Siswa MAN Palopo, *Wawancara*, 14 Oktober 2018.

mengerjakan sesuatu. Serta dapat menunjukkan contoh dari dampak kerja keras sehingga siswa dalam kehidupannya memiliki sikap gigih, kuat dan tidak mudah putus asa.

f). Nilai kemandirian

Kemandirian merupakan salah satu nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan. Dalam pembelajaran Akidah akhlak, peserta didik diajarkan tentang kemandirian sebagai salah satu dari akhlak yang terpuji. Selain nilai kejujuran, kemandirian juga ditanamkan agar peserta didik memiliki kepercayaan terhadap kemampuan pribadi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau amanah, dengan tanpa menggantungkan diri kepada orang lain.

Nilai ini biasanya diajarkan dalam setiap proses pembelajaran. Secara tidak langsung siswa dibiasakan mandiri untuk melaksanakan shalat dhuha dan tanpa pengawasan guru. Seperti yang diungkapkan salah satu siswa mengenai penanaman nilai mandiri di dalam proses pembelajara:

“Dan kita juga mencoba selalu mandiri dalam mengemban amanah yang diberikan, misalnya ketika tadarus pagi tanpa ada pengawasan otomatis kita langsung memulai tadarus, dan sebelum pelajaran kita semua tanpa disuruh langsung melaksanakan shalat dhuha. Hal yang semacam itu yang membuat kita jadi mandiri dan terbiasa melakukannya”.⁶

Dengan demikian nilai kemandirian sudah mulai tertanam di dalam diri siswa meski masih dalam tataran melaksanakan tugas sekolah. Namun yang pada akhirnya jika nilai kemandirian sudah biasa dilakukan maka otomatis dapat diaplikasikan pula dalam kehidupan sehari-hari.

⁶ Fazil Nor Siswa MAN Palopo, *Wawancara*, 14 Oktober, 2018

g). Nilai keadilan (*adele'*)

Nilai keadilan menjadi penting ditanamkan kepada peserta didik karena merupakan keluhuran budi yang mencerminkan pribadi muslim yang baik. Selain diajarkan dalam materi PKN dalam aspek akhlak yang merupakan salah satu sifat terpuji, nilai keadilan juga ditampilkan oleh guru dalam rangka menanamkan nilai keadilan terhadap peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Muh. Yunus bahwa guru sangat menekankan nilai adil dalam proses pembelajaran terutama dalam memperhatikan siswa. Karena setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk menerima pengajaran dan perhatian dari guru. Tidak membedakan kaya, miskin, pintar, kurang pintar, cantik, kurang cantik, tentunya guru harus memperlakukannya dengan adil.⁷

Dengan kesadaran guru akan keadilan memperlakukan peserta didik dengan baik, maka dapat memberikan pelajaran yang baik untuk peserta didik. Nilai keadilan secara tidak langsung dapat tertanam di dalam diri setiap peserta didik karena merasa diperlakukan sama dalam konteks adil sebagaimana haknya. Dengan demikian diharapkan nilai keadilan yang ditanamkan dapat menjadikan siswa mampu mengidentifikasi tindakan adil dan mampu menghindari diri dari sikap berat sebelah atau tidak seimbang.

h). Nilai kepedulian

Sebagai bagian dari salah satu sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama, kepedulian juga dijelaskan secara eksplisit pada materi pelajaran PAI. Selain ditanamkan melalui proses pembelajaran, nilai kepedulian ini juga sangat terlihat

⁷ Muh. Yunus, Guru PKN, *Wawancara*, 14 Oktober 2018

sudah tertanam pada sebagian besar peserta didik. Terlihat ketika peneliti sedang melakukan observasi, rupanya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo sangat memperhatikan lingkungan. Hampir di setiap depan kelas terdapat tempat sampah. Hal tersebut ternyata dapat melatih peserta didik untuk membiasakan hidup bersih.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesembilan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah ditanamkan dalam pembelajaran. Namun sayangnya, nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi tersebut belum tersusun secara sistematis dalam penerapannya. Hal itu terbukti tidak adanya prosedur khusus dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Selain itu tidak ada kurikulum khusus yang diberikan sebagai acuan bahan ajar yang sesuai dengan penanaman nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada masing-masing jenjang kelas. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo:

“Dari pusat memang tidak ada sosialisasi apalagi memberikan kurikulum khusus pendidikan anti korupsi disini, dalam kurikulum pun, hanya saja terintegrasi pada semua mapel, Jadi penanaman tersebut melalui inisiatif guru dan pihak sekolah untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada perangkat pembelajaran seperti RPP agar sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Hanya saja kendalanya terkadang guru masih bingung dalam merancang nilai-nilai tersebut dalam RPP.”⁸

Dengan begitu, hal tersebut tentunya dapat menjadi faktor penghambat proses transfer nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Karena guru hanya mengacu pada keterkaitan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dengan materi pembelajaran. Ditambah lagi dengan muatan materi yang terlalu

⁸ Maida Hawa, Kepala Sekolah MAN Palopo, *Wawancara*, 8 Oktober 2018

banyak dan belum teraturnya termuat dalam RPP bisa terdapat kemungkinan nilai-nilai pendidikan anti korupsi belum tercover dengan baik.

Oleh karena itu artinya perlu ada upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh, di samping memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia.

3. Upaya madrasah dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam memaksimalkan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo di antaranya: 1) Dibutuhkan guru yang profesional dalam arti mempunyai keilmuannya, berakhlak dan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya, 2) Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi ditambah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan peserta didik dengan serius sebagai bagian pembelajaran, 3) Mewajibkan peserta didik ibadah-ibadah tertentu di sekolah dengan bimbingan guru (misalnya rutin melaksanakan salat dhuhur berjamaah), 4) Tersedianya tempat ibadah yang layak bagi kegiatan keagamaan, 5) Membiasakan akhlak yang baik di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah (misal program salam, sapa, dan senyum), 6) Guru dapat mengimplementasikan pendidikan agama dalam keseluruhan materi yang diajarkan sebagai wujud pendidikan karakter secara menyeluruh. Jika beberapa hal tersebut dapat terlaksana niscaya tujuan pendidikan nasional dalam menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dapat tercapai.

Tata tertib sekolah juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Aturan sekolah dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan warga sekolah agar terbiasa untuk hidup secara tertib dan teratur. Salah satu contoh tata tertib yang berlaku di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo seperti larangan membawa *handphone* ke sekolah. Siswa diajarkan untuk hidup sederhana, tidak memakai barang-barang yang belum sepatutnya dimiliki dan diperlukan oleh anak-anak seusia mereka. Aturan tersebut dimaksudkan agar siswa tidak kecanduan dalam menggunakan *handphone*, karena terdapat beberapa aplikasi yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap belajar siswa apabila tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua, contohnya game.

Ada juga aturan lainnya, seperti jam masuk sekolah pukul 07.15 WIB, siswa dan guru harus datang tepat waktu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan melakukan pembiasaan untuk melatih kedisiplinan, larangan memakai perhiasan di lingkungan madrasah agar siswa dapat hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, dan lain-lain. Dengan pemberlakuan aturan yang jelas bagi semua warga sekolah dan adanya hukuman yang tegas bagi pelanggarnya akan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.

a. Pembiasaan perilaku positif

Setelah siswa mengetahui tentang apa itu korupsi dan bahayanya melalui sosialisasi yang dilaksanakan sekolah, maka siswa dapat mengetahui mana perbuatan yang mengandung unsur koruptif dan mana perbuatan yang bukan

termasuk koruptif. Dengan pengetahuan siswa yang semakin banyak tentang Pendidikan Anti korupsi, maka akan berdampak pada sikap dan perilaku siswa yang menuju ke arah positif. Pembiasaan perilaku positif seperti kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab harus terus dilakukan sehingga membentuk suatu karakter kepribadian siswa yang anti korupsi.

Menurut Teguh Yuwono penanaman pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui: (1) *Curriculum*, (2) *The Ritual Life* (3) *Teachers*. *Curriculum* berarti materi anti korupsi diajarkan lewat jalur pendidikan dengan memasukkan dalam materi mata pelajaran. *The ritual life* berarti nilai-nilai anti korupsi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan *teachers* berarti guru tidak hanya memberikan teori saja, tetapi juga contoh kepada siswanya.

b. Sanksi yang tegas

Pemberian sanksi kepada siswa bukan bermaksud untuk menghukum siswa, tetapi untuk memberikan pendidikan dan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemberian sanksi menjadi jalan terakhir jika cara-cara halus seperti sosialisasi dan pembiasaan perilaku positif tidak berjalan. Pemberian sanksi yang tegas tidak boleh sembarangan diberikan tetapi harus melalui beberapa tahap. Misalnya seorang siswa melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka tindakan yang pertama yaitu menasehati terlebih dahulu. Jika masih melanggar diberi teguran, dan jika masih melanggar untuk yang ke tiga kali, maka baru dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Pemberian sanksi yang tegas bukan berarti menyuruh berdiri dan berlari di lapangan atau bahkan memukul siswa, tetapi pemberian sanksi yang bersifat mendidik, misalnya siswa dihukum untuk meresume buku, membuat tugas tambahan dan lain sebagainya. Dengan pemberian sanksi yang tegas diharapkan siswa akan sadar akan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dengan mengamalkan atau melaksanakan Pendidikan Anti korupsi dalam lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya.

Upaya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dalam proses pembelajaran telah memposisikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran semata. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, guru lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Namun demikian dalam salah satu proses pembelajaran mata akidah akhlak pendekatan pembelajaran telah *teacher center*, namun dalam pelaksanaan masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan tugas yang diberikan kepada peserta didik bersifat individual, sehingga interaksi antar peserta didik, juga interaksi antara peserta didik dengan guru yang memudahkan peserta didik mewujudkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, belum terjadi. Bahkan pada saat seharusnya siswa bertanggung jawab dengan jawabannya, guru secara tidak disadari menuntun jawaban peserta didik, sehingga justru peserta didik menjadi kurang mewujudkan nilai tanggung jawab.

Dalam proses pembelajaran mata pelajaran al-Quran Hadis guru berupaya mewujudkan nilai tanggung jawab, dengan jalan setelah menghafal bersama-sama dengan guru, peserta didik harus menghafalkan di hadapan guru secara tatap

muka. Cara demikian sebenarnya bagus dari aspek tanggung jawab secara personal, namun demikian terdapat kekurangannya, yaitu bagi peserta didik yang tidak ke hadapan guru cenderung melakukan apapun yang ingin mereka lakukan, yang kurang sesuai dengan aktivitas pembelajaran (mengobrol, main HP, malas-malasan, bahkan ada peserta didik yang meninggalkan kelas), sehingga mereka tidak memperhatikan proses berlangsungnya pembelajaran. Keadaan ini sedikit terdukung dengan tanpa dilakukannya teguran, sapaan, ataupun peringatan dari guru. Dengan demikian upaya menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran perlu didukung pemilihan dan penentuan model pembelajaran, disesuaikan juga dengan jiwa peserta didik/karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan, *teacher center* dan *student center* sama-sama membutuhkan manajemen dari seorang guru.

Dalam ranah pelaksanaan memungkinkan kedua model pembelajaran ini dilaksanakan secara bergantian dalam satu proses pembelajaran tertentu, dengan memperhatikan situasi siswa dan situasi kelas. *Student center* dengan kondisi siswa yang kurang semangat dalam belajar, menjadi tidak efektif. *Teacher center* dengan kurang mampuan guru dalam menjelaskan dan mengelola kelas, menjadi tidak efektif pula. Selanjutnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo, perlu lebih lanjut belajar dan berlatih terus memadukan kedua pendekatan pembelajaran tersebut, dengan pertimbangan kondisi siswa dan kemampuan guru.

4. Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi.

Kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa

diajarkan untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam kegiatan individu maupun kelompok. Para siswa diajak melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa melakukan hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata, menjadi mandiri (*self regulated learner*), kerja kelompok dengan saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah, berfikir kritis dan kreatif, menganalisis, membuat sintesis, serta membuat keputusan berdasarkan logika dan bukti-bukti. Sehingga siswa akan mampu menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna.

Metode dan strategi pembelajaran sebagaimana pendapat Gulo yang dikutip dalam buku Jamil Suprihatiningrum dengan judul buku "*Strategi Pembelajaran*" merupakan rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif.⁹ Seperti proses pembelajaran Akidah Akhlak dengan diterapkannya program pendidikan anti korupsi di sekolah tentunya metode dan strategi pembelajaran pun harus disiapkan dengan matang agar proses penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat dipahami oleh peserta didik. Dalam proses pembelajarannya guru menggunakan beberapa metode dan strategi yang sesuai dengan materi dan nilai yang akan disampaikan. Berikut analisis metode pembelajaran sebagai penanaman nilai pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo;

⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), h. 148.

1). Metode ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Melalui metode ceramah, guru mencoba menyampaikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikaitkan melalui materi pembelajaran.

Hal itu baik dilakukan karena dengan metode ceramah guru dapat mengarahkan pola pikir peserta didik melalui cerita-cerita anti korupsi, contoh-contoh kongkrit dan menunjukkan tokoh-tokoh yang dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Dengan metode ini secara tidak langsung guru telah menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pembelajarannya. Namun, tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat tersampaikan secara maksimal. Ada beberapa kelemahan tentunya dengan menggunakan metode ceramah ini. Di antaranya, terkadang membuat peserta didik bosan dan pasif, karena pada metode ini guru lebih aktif dari siswa. Dan dengan metode ceramah pula guru sukar dalam menyimpulkan pemahaman peserta didik dengan materi yang disampaikan.

2). Metode diskusi

Metode diskusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Cara penyajiannya, di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Tidak berbeda dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada pembelajaran PKn,

al-Qur'an Hadis biasanya guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan makna dari suatu ayat yang kemudian peserta didik mencari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tersebut.

Hal itu tentunya dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa. Dengan metode tersebut siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam ayat al-Quran, sehingga dihasilkan pemaknaan yang sesuai dengan petunjuk guru. Jika dianalisis, menggunakan metode diskusi ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam memahami materi pembelajaran serta nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang ditanamkan.

Dalam proses pembelajaran guru melibatkan siswa untuk mendiskusikan problematika yang terkait dengan materi yang kemudian dihubungkan dengan masalah-masalah tindak korupsi baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu dengan metode diskusi dapat menanamkan nilai kepedulian kepada peserta didik untuk saling memperdulikan sesama siswa untuk aktif bersama.

3). Metode tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Penggunaan metode tanya jawab bermaksud memotivasi peserta didik untuk bertanya selama proses belajar mengajar, atau guru yang bertanya (mengajukan pertanyaan) dan peserta didik menjawabnya. Hal tersebut juga terlihat dari proses belajar mengajar dalam pembelajaran kelas. Seperti ketika guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan, namun jarang sekali siswa

yang bertanya. Tampaknya mereka telah memahami atau tidak ada keberanian untuk bertanya.

Hal itulah yang sering terjadi saat metode tanya jawab digunakan. Namun, di kekurangan tersebut guru mempunyai inisiatif untuk mendorong siswa lebih aktif sekaligus menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Guru dapat menstimulus peserta didik dengan memberi pertanyaan dengan langsung menunjuk siswa melalui absensi. Hal tersebut kiranya dapat melatih keberanian dalam diri siswa untuk mengungkapkan pendapat. Meskipun masih dalam tataran dipaksa, namun pada akhirnya dapat terbiasa untuk berani dalam bertanya maupun mengungkapkan pendapat.

4) Metode hafalan

Metode hafalan merupakan metode yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran al-Qur'an Hadis. Banyak nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang ditanamkan dalam metode ini. Dalam setiap pembelajaran al-Qur'an Hadis, peserta didik selalu dituntut untuk menghafal ayat-ayat al-Qur'an yang terkait pada materi pelajaran saat itu. Dalam teknisnya, terkadang guru tidak memberikan pengawasan kepada peserta didik ketika menghafal. Tujuannya untuk menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, kemandirian dan tanggung jawab kepada peserta didik.

Sudah tidaknya nilai itu tertanam dalam diri siswa, guru dapat mengetahuinya ketika guru meminta siswa untuk menyetorkan hafalannya. Jika pada saat siswa belum menghafal dengan baik, maka terdapat kemungkinan siswa tersebut belum dapat memegang tanggung jawabnya untuk menghafal. Hal

tersebut rupanya memberikan efek malu ketika siswa belum dapat menghafal dengan baik dihadapan teman-temannya. Oleh karena itu, guru selalu memberikan pesan kepada siswa “jika ingin menghafal dengan baik, maka syaratnya adalah harus jujur, lalu kerja keras dan serius dalam menghafal, jangan mudah putus asa, dan ketika diperintahkan untuk menghafal maka harus menghafal, tidak digunakan untuk aktivitas yang lain”.

Dengan metode hafalan ini, rupanya dapat belajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswa. Dengan pembiasaan menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an, maka terlatih pula semangat dan kerja keras peserta didik. Harapannya, peserta didik juga dapat mengambil makna dari aktivitas tersebut sebagai penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

5) Metode keteladanan

Metode keteladanan merupakan metode yang sangat penting digunakan oleh guru tidak hanya pada saat proses pembelajaran, namun disegala aktivitas baik di kelas maupun di luar kelas. Pada metode keteladanan ini gurulah yang menjadi titik pusat sebagai sosok panutan atau teladan bagi peserta didiknya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru al-Quran Hadis sebagai berikut;

“Guru seharusnya harus bisa seperti Rasulullah Saw yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Hal itu karena Rasulullah tidak hanya memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Yang disayangkan guru-guru sekarang itu adalah memberi contoh tapi belum bisa menjadi contoh”¹⁰

Dengan strategi seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa terkecuali. Guru akan ikut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Guru tidak hanya

¹⁰ Abd. Majid Guru Al-Quran Hadis, *Wawancara*, 14 Oktober 2018

memberikan pemahaman nilai hidup anti korupsi yang bersifat informatif (kognitif semata), melainkan bersifat terapan pada setiap mata pelajaran.

Pola keteladanan ini yang sangat ditekankan oleh para guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo khususnya guru-guru umum. Karena pada dasarnya tidak jarang para siswa menjadikannya idola dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki budi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, sehingga mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.

Beberapa metode tersebut merupakan metode pembelajaran yang di dalamnya juga ditanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dengan pengintegrasian tersebut membuat guru lebih mudah dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi karena menyatu dalam satu metode proses pembelajaran. Namun, terkadang nilai-nilai pendidikan anti korupsi belum dapat ditanamkan secara maksimal, karena tidak tepatnya metode yang digunakan, membuat siswa tidak dapat memahami dengan baik.

Selain metode pembelajaran yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo juga menggunakan dua strategi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Berikut analisis strategi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi:

1) Strategi integratif

Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo nilai-nilai pendidikan anti korupsi terintegrasi pada mata pelajaran khususnya Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadis dan PKn. Guru dalam proses pengajarannya mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagai pengintegrasian nilai-nilai

Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran. Namun sayangnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi tersebut belum tersistematis dengan baik. Belum ada sosialisasi khusus dalam penanaman Pendidikan Anti Korupsi dalam materi pelajaran.

Idealnya strategi integrasi ini bisa dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media dan sumber belajar. Integrasi melalui materi dapat dilakukan dengan memberikan penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang madrasah atau sekolah. Sedangkan integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang dapat mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya.

2) Strategi pengembangan

Di samping penggunaan strategi integrasi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga menggunakan strategi pengembangan. Pada strategi pengembangan ini penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dilakukan pada melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran di kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler. Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo penanaman nilai-nilai tersebut juga ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, paskibraka dan rohis. Seperti yang diungkapkan oleh waka kesiswaan sebagai berikut:

“Untuk kegiatan siswa itu sendiri biasanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, PMR, Paskibraka, Rohis dan masih

banyak lagi. Lewat kegiatan ekstrakurikuler itulah nilai-nilai pendidikan anti korupsi ditanamkan. Seperti Pramuka mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kerja keras, tanggung jawab, kepedulian, kejujuran yang semua itu juga merupakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Tidak hanya di Pramuka di PMR, Paskib dan Rohis juga demikian. Dan yang menjadi pembina-pembina ekstrakurikuler juga di pilih dari bapak ibu guru yang memang telah mengikuti seminar-seminar dan workshop pendidikan anti korupsi, jadi dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi secara tepat sasaran kepada siswa”.¹¹

Dengan demikian, dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi tidak terhenti pada saat proses pembelajaran di kelas saja. Penanaman tersebut tetap berlanjut pada kegiatan ekstrakurikuler yang siswa ikuti di sekolah. Dalam pemilihan pembina ekstrakurikuler Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo juga melihat kompetensi pada masing-masing guru. Hal itu terbukti menurut penuturan waka kurikulum tersebut, bahwa bapak ibu guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler adalah mereka yang telah mengikuti workshop dan seminar pendidikan anti korupsi sebagai bekal dalam membimbing dan menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada siswa.

Dalam strategi pengembangan dicontohkan pula dalam buku panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di madrasah, diantaranya:

- a) Melaksanakan pemilihan kepengurusan organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR, Paskib) dan panitia kegiatan dilaksanakan secara demokratis dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan mengutamakan kemampuan dan kualitas siswa tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subyektif yang mengarah pada korupsi.

¹¹ Udding, Wakil Kepala Madrasah bagian Kesiswaan MAN Palopo, *Wawancara*, 20 Oktober 2018.

- b) Memastikan bahwa setiap anggota pengurus organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR, Kopsis,) dan panitia kegiatan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh dedikasi keikhlasan dan rasa pengabdian.
- c) Semua hasil keputusan rapat, setiap rencana, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan kesiswaan diumumkan secara tertulis di dalam papan informasi kegiatan siswa secara terbuka. Untuk itu setiap proses dan hasil keputusan rapat ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pengurus atau panitia kegiatan.

Dalam beberapa contoh di atas diharapkan dapat menjadi contoh ideal dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sehingga pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat dirasakan dan difahami secara langsung oleh peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang menuntut mereka untuk secara langsung mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan di sekolah.

Pengembangan kegiatan kesiswaan pada prinsipnya, semua kegiatan kesiswaan secara intrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dengan kadar yang berbeda. Namun, jika tidak dikembangkan secara sengaja dan terencana tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara efektif. Kegiatan kesiswaan yang dimaksud adalah kegiatan kesiswaan yang selama ini sudah ada dan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Beberapa kegiatan kesiswaan tersebut di antaranya adalah: (a) Kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); (b) Pramuka; (c) Koperasi siswa; (d) Palang Merah Remaja; (e) Majalah Dinding atau Majalah Madrasah/Siswa; (f) Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan; (g) Pentas Seni; (h) Pertandingan Olahraga, dan sebagainya.

Menurut Ibu sitti Ainun nilai sederhana dapat dilihat dari cara berpakaian, sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik, sikap peserta didik terhadap kebijakan pemakaian seragam sekolah.¹² Terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai dalam proses pembelajaran tersebut, peneliti belum mendapatkan data bahwa guru secara jelas menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan anti korupsi. Terdapat kemungkinan siswa belum mengerti bahwa nilai-nilai tersebut merupakan karakter yang ingin ditanamkan dan dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi, yang bertujuan menanamkan jiwa dan sikap anti korupsi. Dengan demikian peneliti mengusulkan dalam proses pembelajaran berikutnya guru secara jelas menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diupayakan terwujud merupakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, dan apabila peserta didik mewujudkan, berarti peserta didik telah berlatih tidak korupsi.

Metode pembelajaran nilai-nilai pendidikan anti korupsi adalah diskusi kelas, studi kasus, skenario sistem pengembangan, diskusi investigasi,¹³ eksplorasi tematik, prototipe, pembuktian kebijakan pemerintah, alat-alat pendidikan,

¹² Sitti Nun Ainun, Guru Akidah Akhlak MAN Palopo, *Wawancara*, di Palopo, 20 Oktober 2018

¹³ Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 53-57.

pembelajaran keterampilan menulis terpadu, dan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial. Di antara metode-metode tersebut, yang memungkinkan dilaksanakan oleh guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo pada proses pembelajaran adalah diskusi kelas, studi kasus, laporan investigasi, pembuktian kebijakan pemerintah, pembelajaran keterampilan menulis terpadu, dan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial.

Berdasarkan data penelitian metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo adalah diskusi kelompok, diskusi kelas, hafalan, dan praktik. Berdasarkan pada pendapat Eko Handoyo tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa metode guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran belum variatif dan kreatif. Dengan demikian masih harus dilakukan pelatihan atau workshop pengembangan kreativitas metode pembelajaran untuk para guru.

Pelaksanaan diskusi kelompok dan diskusi kelas diawali dengan pemberian tugas secara berkelompok, baik tugas penyelesain soal, tugas pembuatan makalah, dan tugas penciptaan kreasi gerakan. Diskusi kelompok dan diskusi kelas tentang tugas langsung dikoodinasikan saat proses pembelajaran. Sedang diskusi kelompok dan diskusi kelas tentang kreasi gerakan, makalah, karya tulis ilmiah, dilakukan sejak sebelum pengumpulan atau presentasi ke depan kelas. Berdasarkan observasi peneliti terhadap diskusi kelompok dan diskusi kelas sebagian sudah dilaksanakan secara efektif, dan sebagian lain belum dilaksanakan secara efektif. Menurut peneliti hal tersebut terjadi dikarenakan belum terdapatnya

pembagian tugas dalam kelompok tersebut, serta belum ditetapkannya aturan saat diskusi akan dimulai. Agar diskusi kelas maupun diskusi kelompok berjalan lebih efektif, maka guru harus memfasilitasi pembagian tugas antar anggota kelompok, dan penetapan aturan main saat diskusi

Berdasarkan keterangan dari Abdul Majid, bahwa untuk penilaian ini guru mengalami beberapa kesulitan, kesulitan tersebut terletak pada perumusan indikator tercapainya perubahan sikap dan perubahan pikiran, yang berdampak pada perubahan perilaku. Kesulitan berikutnya terletak pada proses pengamatan yang membutuhkan pencermatan dan waktu tersendiri, terlebih jika kelas merupakan kelas besar. Selain itu guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo belum secara konsisten melakukan penilaian terhadap hasil pencapaian nilai peserta didik, sehingga tindak lanjut yang dilakukan terkadang belum bersifat komphrehensif.¹⁴

Pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran diperlukan pendekatan *lesson study*. Melalui pendekatan *lesson Study*, beberapa kesulitan yang dihadapi guru dapat terbantu terselesaikan. Misalnya terkait dengan perumusan indikator, perumusan instrumen penilaian, pencatatan terhadap perubahan sikap peserta didik, evaluasi, dan merumuskan rencana tindak lanjut, guru bersama beberapa guru dapat melakukan secara bersama-sama. Tim *lesson Study* dapat terdiri dari beberapa guru dengan bidang atau mata pelajaran yang berbeda, yang paling penting adalah adanya waktu bersama untuk duduk bersama dan bertindak bersama dalam merencanakan,

¹⁴ Abdul Majid, Guru al-Quran- Hadis MAN Palopo, *Wawancara*, 12 Oktober 2018

melaksanakan, dan mennegevaluasi proses pembelajaran implementasi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran bahwa semua guru bertugas untuk mengembangkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan data penelitian, mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo merupakan mata pelajaran yang paling banyak mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi dalam proses pembelajarannya. Guru mata pelajaran Akidah Akhlak dalam mengimplentasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak ini, nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi diimplementasikan secara hangat, ramah, dan menarik, sehingga siswa mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi dalam sikap dan perilakunya saat proses pembelajaran terlihat nyaman dan tidak terbebani. Sedangkan dalam mata pelajaran PKn, guru mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan nilai-nilai yang akan dihabituasikan.

Hal ini berkonsekuensi pada pembelajaran yang nyaman, menyenangkan peserta didik, sehingga nilai-nilai pendidikan anti korupsi terimplementasi dalam sikap dan perilaku siswa secara alamiah, bukan dengan tekanan dan paksaan. Sedangkan dalam mata pelajaran PKn, guru memiliki ketelatenan dan kesungguhan dalam upaya menghabituasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran, dengan selalu keliling kelas, mengarahkan, menegur, dan memotivasi siswa dalam bersikap pada saat diskusi.

Nilai-nilai anti korupsi telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo sebelum maraknya Pendidikan Anti korupsi yang disosialisasikan oleh KPK. Nilai-nilai anti korupsi tidak hanya diajarkan oleh guru PKn saja, melainkan juga diajarkan dalam setiap mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dilakukan dalam setiap kesempatan seperti pada saat upacara bendera, proses belajar, dan kegiatan lainnya.¹⁵

Pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PKn agar bisa maksimal, maka tidak cukup hanya dalam teori atau pemahaman saja, namun juga harus diterapkan dalam praktek keseharian baik oleh siswa maupun guru di dalam kelas. Guru PKn disamping memberikan pemahaman dan menganjurkan siswa untuk melaksanakan Pendidikan Anti korupsi, juga harus memberi contoh sikap dan perilaku anti korupsi. Guru PKn bisa memberi contoh dengan mengajar tepat waktu, tidak membedakan siswa, pemberian nilai sesuai dengan kemampuan siswa, dan lain sebagainya.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru PKn sering menggunakan metode diskusi, presentasi dan penugasan rumah. Dalam diskusi dan presentasi apabila dikaji lebih dalam, maka terdapat nilai-nilai anti korupsi yang perlu dikembangkan oleh guru dan siswa. Nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditemukan dalam model diskusi dan presentasi adalah nilai kedisiplinan, nilai keterbukaan, dan nilai tanggung jawab. Dalam proses diskusi dan presentasi, guru PKn menentukan waktu yang bisa digunakan oleh siswa

¹⁵ Muh. Yunus Guru PKn MAN Palopo, *Wawancara*, di Palopo, 13 Oktober 2018

untuk berdiskusi dan presentasi. Dari penentuan waktu inilah, guru PKn dapat mengajarkan siswa untuk berlatih disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya. Dalam hal nilai keterbukaan, guru PKn memberikan kriteria nilai dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Setelah siswa melakukan tugasnya yaitu berdiskusi dan presentasi, guru PKn akan mengumumkan nilai yang diperoleh siswa dari hasil diskusi dan presentasi. Dari proses inilah menunjukkan adanya penanaman dan penerapan Pendidikan Anti korupsi yaitu melalui nilai keterbukaan.

Guru PKn dalam memberikan penugasan rumah kepada siswa sering menggunakan lembar kerja siswa (LKS) sebagai bahan penugasan. Banyak sekali nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditemukan dalam kegiatan penugasan rumah seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan keterbukaan. Pemberian tugas rumah akan melatih kejujuran siswa dalam mengerjakan tugasnya, apakah siswa mengerjakan tugasnya sendiri atau menyontek pekerjaan siswa lain. Nilai kedisiplinan dalam pemberian tugas rumah akan tercermin dalam penyelesaian tugas dan pengumpulan tugas rumah kepada guru, apakah tepat waktu atau terlambat. Pemberian tugas rumah juga akan melatih tanggung jawab, siswa terhadap tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh guru kepada siswa.

Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa akan dilibatkan guru untuk mengevaluasi pekerjaan rumah dengan jalan koreksi silang yaitu pekerjaan siswa ditukarkan dengan pekerjaan siswa yang lainnya untuk dikoreksi bersama. Dalam pengoreksian silang ini, siswa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

maupun peninjauan jika ada kesalahan dalam pemberian nilai. Dari pelaksanaan koreksi silang ini menunjukkan adanya penerapan nilai keterbukaan dalam pembelajaran PKn siswa diberi kesempatan untuk mengoreksi tugas temannya. Disamping itu, dalam pengoreksian silang ini, siswa akan dilatih mengamalkan nilai kejujuran.

1. Faktor Pendukung

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di MAN Palopo, faktor-faktor tersebut diantaranya terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Secara ringkas faktor pendukung nilai-nilai kearifan loka Luwul dalam Pendidikan Anti Korupsi ialah

- a). Lingkungan sekolah
- b). Kurikulum. K.13

2. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung dari program Pendidikan Anti Korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan penanaman nilai-nilai tersebut, Pendidikan Anti Korupsi;

- a) Minimnya kesadaran diri siswa

Kurangnya kesadaran siswa dan kebiasaan perilaku koruptif menjadi faktor yang mendasar sulitnya untuk mengamalkan nilai-nilai anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo. Meskipun sudah diajarkan dan selalu disinggung dalam berbagai kegiatan sekolah, tetapi masih ada beberapa siswa yang melakukan perilaku koruptif. Dari hambatan tersebut, guru memberikan solusi dengan adanya sanksi yang tegas kepada para siswa yang melakukan

perilaku korupstif agar dapat menyadarkan siswa akan pentingnya bersikap disiplin, jujur, dan mematuhi aturan sekolah sebagai wujud tindakan anti korupsi.

b) Latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang mendukung

Latar belakang atau kondisi keluarga peserta didik yang kurang mendukung menjadi salah satu penghambat dalam mendidik siswa berperilaku antikorupsi. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik.

c) Kemampuan guru dalam menyisipkan nilai-nilai anti korupsi

Dalam penyampaian pendidikan anti korupsi diperlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk mencermati setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum sehingga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Kemampuan profesionalisme guru sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan anti korupsi. Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo guru terkadang mengalami kesulitan untuk mengemas atau menyisipkan materi yang relevan dengan pendidikan anti korupsi dalam topik pembelajaran. Topik khusus tentang upaya pemberantasan korupsi dalam Kurikulum 2013 memang tidak ada, oleh karena itu guru harus jeli dan memiliki kemampuan untuk menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dengan tepat ke dalam tema pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, guru harus melakukan kerjasama dan saling sharing dengan guru lainnya agar tidak mengalami kesulitan dalam menyisipkan nilai pendidikan anti korupsi dalam materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa.

d) Keterbatasan sumber belajar tentang pendidikan anti korupsi

Buku merupakan salah satu sumber belajar yang mendukung efektifitas

suatu program pembelajaran. Ketersediaan buku yang memadai akan dapat memperlancar terlaksananya suatu kegiatan pembelajaran. Kurangnya literatur menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pembiasaan-pembiasaan. Lembaga pendidikan mengajarkan dan mendidik siswanya agar terarah dan berakhlak mulia. Lembaga pendidikan dapat memainkan peran aktifnya dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai luhur, memiliki kesadaran moral untuk memberantas tindak korupsi pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo.

Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan keadilan, dapat dinyatakan bahwa para guru di MAN Palopo belum mencoba mewujudkan nilai sederhana. Sedangkan nilai adil sudah dicoba diwujudkan oleh satu orang guru, yaitu guru pelajaran PKn, dengan cara melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang mewakili presentasi, karena saat tersebut semua kelompok ingin mempresentasikan karyanya. Guru mengalami kesulitan untuk melatih peserta didik mewujudkan nilai kesederhanaan dalam proses pembelajaran.

Penanaman karakter pada peserta didik berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter, mereka adalah calon generasi bangsa yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadikan negara yang berperadaban,

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan akhlak dan budi pekerti yang baik serta menjadi generasi yang berilmu pengetahuan tinggi dan menghiasi dirinya dengan iman dan taqwa.

B. *Pembahasan*

Pendidikan nilai bahkan menjadi substansi dasar dari proses belajar mengajar. Karena itu para pelaku pendidikan perlu menginternalisasikan sikap anti korupsi kepada peserta didik dalam segala tingkat. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi langkah awal dalam menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Melalui pendidikan anti korupsi siswa akan mampu memahami tentang ruang lingkup korupsi, modus, maupun dampak korupsi, dalam lingkup kecil maupun besar. Sehingga nantinya diharapkan akan tumbuh kesadaran dan sikap anti korupsi.

Tahap integrasi nilai-nilai kearifan dalam pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dimulai dari guru memperkenalkan nilai-nilai yang baik dan kurang baik kepada siswa-siswinya. Kemudian dengan pemahaman nilai kearifan lokal dan pendidikan anti korupsi diharapkan siswa mampu menerapkan dalam praktek perbuatan yang nyata. Pendidikan nilai bahkan menjadi substansi dasar dari proses belajar mengajar. Oleh karena itu para pelaku pendidikan perlu menginternalisasikan sikap anti korupsi kepada peserta didik dalam segala tingkat. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi langkah awal dalam menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Melalui pendidikan anti korupsi siswa akan memahami tentang ruang lingkup korupsi, modus, maupun tindakan pencegahan.

Dengan demikian idealnya pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh dapat melalui cara-cara berikut ini:

1. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan anti korupsi.
2. Menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator.
3. Menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya.
4. Menyisipkan instrument yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi, dan
5. Menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.¹⁶

Sementara prosedur pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP, di antaranya:

1. Menyisipkan indikator materi pendidikan anti korupsi.
2. Menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran.
3. Menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran.
4. Merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran.
5. Menambahkan sumber belajar, dan

¹⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 57-58.

6. Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran.

Jika konsep tersebut dapat digunakan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran, terutama dalam pencantuman nilai-nilai tersebut di dalam silabus dan RPP, tentunya akan membantu guru dalam pelaksanaan sehingga proses penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat tersampaikan secara sistematis dan maksimal.

Menempatkan kejujuran sebagai habituasi pokok dalam Pendidikan Anti Korupsi di sekolah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai aktivitas kurikuler, dan ekstrakurikuler merupakan bentuk yang sangat tepat. Hal ini karena tujuan utama Pendidikan Anti Korupsi di sekolah tidak dikonstruksi mampu melacak dan berani melaporkan kasus-kasus korupsi, tetapi lebih diarahkan pada pembentukan pola pikir, sikap, kesadaran, dan perilaku nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, terbuka, dapat dipercaya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Lickona jika penjiplakan/ketidakjujuran (*maceko*) dan semakin rendah tanggung jawab individu sebagai warga negara (*increasing self-centeredness and declining civic responsibility*) terjadi kalangan generasi muda maka hal itu merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa.

Pentingnya kejujuran/amanah (*honesty*) dalam pengembangan karakter; yang diperkuat pendapat Brooks dan Goble fokus pendidikan karakter diarahkan pada nilai “dapat dipercaya (*trustworthy*), meliputi sifat jujur (*Lempu*) dan integritas (*Getteng*), memperlakukan orang lain dengan hormat (*treats people with respect*), dan bertanggung jawab (*responsibility*)”. Hal ini menunjukkan bahwa

kejujuran merupakan modal utama dalam pendidikan karakter di sekolah karena akan memberikan implikasi pada pengembangan nilai-nilai karakter yang lain.

Pada pengembangan kegiatan kesiswaan, maka perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

a. Identifikasi nilai dan perilaku anti korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pengembangan kegiatan kesiswaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan sikap obyektif, berorientasi pada kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dalam memilih calon pengurus atau pemimpin.
- 2) Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian.
- 3) Menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama.
- 4) Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan.
- 5) Memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan anti korupsi.
- 6) Memiliki keberanian yang kuat untuk ikut serta melakukan pemberantasan tindak korupsi.
- 7) Memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku anti korupsi.

- 8) Menunjukkan penghayatan dan apresiasi yang mendalam mengenai perilaku anti korupsi.
- 9) Memiliki berbagai sikap terpuji yang dapat menghindarkan diri perilaku korupsi.
- 10) Memiliki perasaan dan kesan yang kuat untuk menghindar dari perilaku korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang dihabituasikan ke dalam berbagai aktivitas di sekolah penting untuk disosialisasikan kepada orang tua agar mendapatkan dukungan, sehingga ada sinkronisasi dan saling memberikan penguatan antara afektif yang dihabituasikan di sekolah dengan di rumah. Kepada pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan perlu memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan dan menyebarluaskan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum sekolah formal dengan menggunakan pendekatan inklusif yang dilakukan secara cermat mulai saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Para kepala sekolah untuk konsisten dan kontinyu mengembangkan budaya sekolah seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dan lain-lain ke dalam kehidupan madrasah.

Pendidikan anti korupsi di madrasah yang dicetuskan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah tidak

sepenuhnya berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Setelah beberapa tahun regulasi itu dikeluarkan, realitanya di lapangan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi.

Di antara hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program pendidikan anti korupsi, berikut ini adalah beberapa hambatan yang penulis temukan di lapangan, diantaranya:

- a) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat ke pihak madrasah.
- b) Tidak adanya pelatihan pendidikan anti korupsi.
- c) Kurangnya inisiatif dari pimpinan untuk memulai program pendidikan anti korupsi;
- d) Kurangnya dukungan dari warga madrasah;
- e) Budaya mencari jalan pintas atau korupsi yang sudah mengakar.
- f) Anti korupsi hanya dijadikan sebagai slogan.

Peranan guru dalam proses pembelajaran tidak dapat digantikan dengan alat elektronik yang canggih sekalipun radio, TV, komputer, dan sebagainya. Karena masih banyak unsur yang bersifat manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan dan motivasi dan kebiasaan yang diharapkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang tidak dapat terwakili oleh media elektronik.

Guru merupakan pengganti atau wakil bagi orang tua peserta didik disekolah. Oleh karena itu, guru wajib mengusahakan agar hubungan antara guru dengan peserta didik dapat serasi, kompak, dan saling menghargai satu sama lainnya, seperti yang terjadi dalam rumah tangga. Guru tidak boleh menempatkan dirinya sebagai penguasa terhadap peserta didiknya, guru memberi sementara

peserta didik ada pada pihak yang selalu menerima apa yang diberikan oleh guru tanpa sikap kritis.

Jadi, tugas guru memerlukan seperangkat nilai yang melekat pada dirinya untuk menciptakan suasana yang seimbang dan harmonis dengan peserta didik. Sebaiknya peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya dengan pengawasan guru. Dalam proses pendidikan yang harmonis guru harus dapat meletakkan dirinya sebagai mitra kerja yang memahami kondisi peserta didiknya.

Strategi merupakan cara-cara yang berbeda dalam mencapai hasil penanaman yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, melalui kebudayaan masyarakat setempat melalui nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dapat memberikan pengutan dalam merancang strategi pembelajaran untuk lebih dekat dan efektif dalam proses pembelajaran.

Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan atau sekolah ini, selanjutnya berkonsekuensi pada adanya upaya menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan. Dikarenakan sudah sangat banyaknya mata pelajaran maka strategi yang paling mungkin dipertimbangkan adalah cara inserting atau penyisipan materi anti korupsi pada semua mata pelajaran.

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah peserta didik dapat mengenali dan memahami korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, dan

mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Dengan Tujuan pendidikan anti korupsi penanaman tidak hanya berhenti dalam tataran kognitif, namun sampai pada tataran afektif dan psikomotorik. Agar tujuan tersebut tercapai maka pendidikan anti korupsi harus menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang kreatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo tentang “Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi ”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo tergambar dalam tiga bentuk, yaitu: bentuk relevansi, bentuk upaya sekolah dan bentuk strategi guru. Ketiga tahapan integrasi pendidikan antikorupsi tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler dilaksanakan dalam mata pelajaran yang di dalamnya terdiri dari unsur materi al-Qur'an dan Hadits, Akidah Akhlak, dan PKn. Di dalam mata pelajaran terdapat beberapa materi yang mengandung nilai-nilai anti korupsi. Sedang kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan luar kelas yang diprogramkan maupun tidak diprogramkan.

2. Upaya guru dalam melaksanakan integrasi nilai-nilai kearifan lokal Luwu, dalam Pendidikan anti korupsi hingga kini masih dalam tahap pengintegrasian mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler seperti, OSIS, Pramuka wajib, pramuka khusus, PMR, Paskibraka dan Rohis, kegiatan tersebut bentuk mejadi disiplin, jujur (*lempu*) dan bertanggung jawab (*getteng*).

3. Strategi guru dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi melalui strategi integrasi mata pelajaran dan strategi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler melalui beberapa pendekatan serta metode seperti: ceramah, diskusi, hafalan dan keteladanan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kesimpulan yang dikemukakan di atas tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo, adalah sebagai berikut:

1. Menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pengintegrasian mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah.
2. Mengupayakan penanaman nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan anti korupsi sebagai landasan pengutan pendidikan karakter.
3. Dunia pendidikan sarat dengan pengetahuan untuk membangun kembali nilai kearifan lokal untuk ditanamkan kepada peserta didik yang tidak lepas dari nilai-nilai kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, M. Amin. *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Ahmad, *Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu*, Tesis Magister, Palopo: IAIN Palopo, 2017.

Alang, M. Sattu, *ANAK SHALEH (Telaah Pergumulan Nilai-nilai Sosio Kultural dan Keyakinan Islam pada Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta: Desertasi UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Depdiknas. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas. 2009.

Dewantara, Ki Hajar, *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977.

Edy, Sedyawati, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Evi, Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ghani Abdul, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Jakarta: Cendikia, 2003.

Haddade, Muh. Naim.. *Ungkapan, Pribahasa, dan Paseng: Sastra Bugis*. Jakarta : Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1986.

Hamid Abu., *Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan dalam Buku Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, Ujungpandang: IAIN Alauddin. 1980.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.

Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Ombak : Yogyakarta, 2013.

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Imam Ahmad Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Jilid 3, 1993.

Irfan, Nurul *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.2011.

Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta : Gama Media, 2006.

Kemenag RI. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.2013.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2011.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: 2011.

Klitgaard, R.. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.

Ludjito, Ahmad, “*Filsafat Nilai dalam Islam*” dalam M. Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

- M. Djamal, *Paradigma penelitian kualitatif edisi revisi*. Yogyakarta: Pustakapelajar, 2015 .
- Maheka, Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK Qodir dkk., Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta:Media Wacana Press. 2006.
- Masitoh & Laksmi Dewi, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: DEPAG RI, 2009.
- Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka.2014.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka. 2014.
- Nuridin, Muhammad, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014.
- Nurtain, *Analisis Item*, Cet. I; UGM, 2001.
- Penulis Tim Depdikbud., *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2004.
- Purnama H.L., *Kerajaan Luwu menyimpan banyak Misteri*, Makassar Arus Timur : 2014.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia atau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rahim, A. Rahman.. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2011.

- Rosydi, Ajip, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama. 2011.
- Rustika Tamrin, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: 2008.
- Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharismun Arikunto, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suprihatiningrum, Jamil. *Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013.
- Suyitno, ed..*Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*.Yogyakarta: Gama Media. 2006.
- Suyitno. *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media2006.
- Takdir, Muhammad. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thamrin, Rustika. *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008.
-*Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 3*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008.
-*Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 2*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008.

Wibowo, Agus, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

JURNAL

Hakim, L. 'Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam', *Taklim*, (2012). 10(2), pp. 141–156. Available at: http://jurnal.upi.edu/file/04_Model_Integrasi_Pendidikan_Anti_Korupsi-Lukman_Hakim.pdf (31 Juli 2018).

Heyneman, S. P. 'Education and corruption', *International Journal of Educational Development*, 24(6), pp. 637–648. doi: 10.1016/j.ijedudev.2004.02.005. 2004. http://www.academia.edu/29593122/Education_and_corruption. (12 Mei 2018)

Istiawati, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*, Jurnal CENDIKIA, Vol.10.1. 2016, <http://cendekia.pusatbahasa.or.id/index.php/cendekia/article/viewFile/78/84>. (24 April 2018)

Irdamiraini, "Korupsi Perspektif Pidana Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Riau: 2008.

Mardia, *Kontekstualisasi Nilai-nilai Pendidikan Spiritual terhadap Penguatan Budaya AssiddiAng Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang*, Jurnal vol. 11, no. 2, 2016. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/1725> (5 Juni 2018)

Pratama, Andhika dan Sumaryat. *Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 2, 2015.

Rofiqul A'la, "Membongkar Suap", Jurnal Teras Pesantren, Sarang Rembang: M3S PP, 1424 2017.

Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat, Vol 14, No 2, 2004. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910>. (15 Agustus 2018)

Shobirin Ma'as, *Model Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar*, (Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jurnal Pendidikan Dasar. Vol. 2. 2015. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/744> (24 September 2018)

Sumiarti. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnaln INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12, No. 2, 2007.

Syukur, Syam Zan. *Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan Luwu*. Jurnal Rihlah. 2014.

Taja, Nadri dan Helmi Aziz. “*Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas*” Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, no.1, 2016.

Yusuf, Muhammad, *Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis*, e-jurnal Volume 11, Nomor 2, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2015.

Yaqin, Nurul, *Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Islamuna volume 2 nomor 2, STAIN Pemekasan, 2015.

SUMBER LAIN

Azra, Azyumardi. “*Pendidikan Anti-korupsi*” dalam harian (Republika, 24 Agustus 2006.

Baco Muh. Sanusi, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, *Taushiyah dalam Rangka Diskusi tentang Sertifikasi Dai yang di Prakarsai oleh Pengurus NU Wilayah Sulsel*, Makassar, 19 Maret 2015. Yusuf, diakses 23 agustus 2018.

Baho, Gordon. “*Gepak Siapkan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Para Siswa*”. Kabarindonesia Online <http://www.kabarindonesia.com/2010/gepak-siapkan-pendidikan-anti-korupsi-untuk-para-siswa>. (26 Desember 2014).

<http://nugrohokriminolog.blogspot.co.id/2017/01/urgensi-pendidikan-antikorupsi-di.html> (24 April 2018).

<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-malu-contoh-sifat-malu-dan.html> (10 April 2018).

<http://syamsudduhaa.blogspot.com/2013/10/pendidikan-nilai-dan-karakter-dalam.html> (23 Mei 2018)

Kemendikbud. *Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/faq> pada tanggal (26 November 2018).

Nugroho, “*Urgensi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*” Blog Nugroho-kriminolog. <http://nugrohokriminolog.blogspot.co.id/2017/01/urgensi-pendidikan-antikorupsi-di.html> (24 April 2018).

UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://www.kpk.go.id>

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf> (2 September 2018).

PGRI-JATEG, *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah*, (Semarang 2016) <http://pgri-jateng.info/archive/read/153/penanaman-nilai-nilai--anti-korupsi-di-sekolah>, (13 Mei 2018).

Pirol Abdul, “*Mengakulah Sebagai Orang Luwu*” Palopo Pos, 23 Januari 2019.

Sandarupa, Stanislaus, “*Kearifan Lokal AntiKorupsi*” Kompas 14 Mei 2011. <https://nasional.kompas.com/read/2011/05/14/03510628/Kearifan.Lokal.Antikorupsi>. (28 Juli 2018).

Daftar Singkatan dan Bahasa Daerah

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= sub nah wa ta' l
saw.	= allah hu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-sal m
H.	= Hijrah
Ditjen Pendis	= Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
M.	= Masehi
MAN	= Madrasah Aliyah Negeri
Q.S. .../... : 4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs li 'Imr n/3: 4
H.R.	= Hadis riwayat
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
RPM	= Remaja Pencinta Musalla
PGAN	= Pendidikan Guru Agama Negeri
PAK	= Pendidikan Anti Korupsi
IMTAQ	= Iman dan Taqwa
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kemenag	= Kementerian Agama
Dikbud	= Pendidikan dan Kebudayaan
UU	= Undang-undang
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional

Bahasa Bugis-Luwu

<i>Adele'</i>	= <i>Adil</i>
<i>Ade'</i>	= <i>Adat</i>
<i>Amacang</i>	= <i>Cerdas</i>

<i>Asitinajang</i>	= Kepatutan
<i>Belona kanukue–pacci</i>	= Hiasan pewarna kuku yang disebut <i>pacci</i>
<i>Dua kuala sappo</i>	= Dua yang saya ambil sebagai pagar
<i>Getteng</i>	= Keteguhan / Tanggung Jawab
<i>Pappaseng</i>	= Pesan Leluhur
<i>Paopao ri Kadong</i>	= Dongeng
<i>Pappagaja</i>	= Nasehat
<i>Pangngaderreng</i>	= Adat Istiadat
<i>Pammasé déwata</i>	= Rahmat Ilahi
<i>Lempu</i>	= Jujur
<i>Lontara</i>	= Aksara Tradisional Masyarakat Bugis
<i>Reso</i>	= Kerja keras
<i>Siri'</i>	= Malu/ Harga diri
<i>Sipakatau</i>	= Saling Memanusiakan
<i>Sipakalebbi</i>	= Saling Mengharagai
<i>Sipakaeinge'</i>	= Saling Menasehati
<i>Tellu Bocco'e</i>	= Tiga yang utama
<i>Temmanginngi</i>	= Tekun
<i>Unganna panasae–lempu</i>	= Tunas nangka yang disebut jujur

RIWAYAT HIDUP



Muhadir Azis, lahir di Maccading, Kabupaten Bone 10 Februari 1992. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Matta, dan Maulana. Bertempat tinggal di Ds. Lasawa Desa. Lalliseng, Kec. Keera Kab. Wajo. Pernah bersekolah di SDN







322 Lalliseng 2005, Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah Putra 1 Sengkang Kab. Wajo kemudian berkat ajakan bapak Akmaluddi, M.Ag (Allah Yarham) peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo dan seslesai pada tahun 2008. Pada tahun 2008, beberapa dosen merekomendasikan peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (STAIN) yang sekarang di kenal Istutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada program studi pendidikan agama Islam, Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2011. Kemudian Pada tahun 2017 peneliti kembali melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di kampus yang sama Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo* yang ditulis oleh Muhadir Azis, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.01.0006, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1440 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

Palopo, 01 Maret 2019

Tim Penguji

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|---|
| 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. | Ketua Sidang/ Penguji (|  |) |
| 2. Dr. Hasbi, M.Ag. | Penguji (|  |) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Penguji (|  |) |
| 4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Pembimbing/Penguji (|  |) |
| 5. Dr. Muhaemin, M.A. | Pembimbing/Penguji (|  |) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang (|  |) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Rektor Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.
NIP. 19740502 2000031001